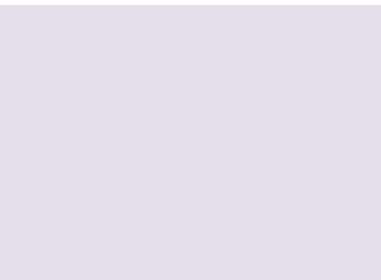


# BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



**2017 - 2022**

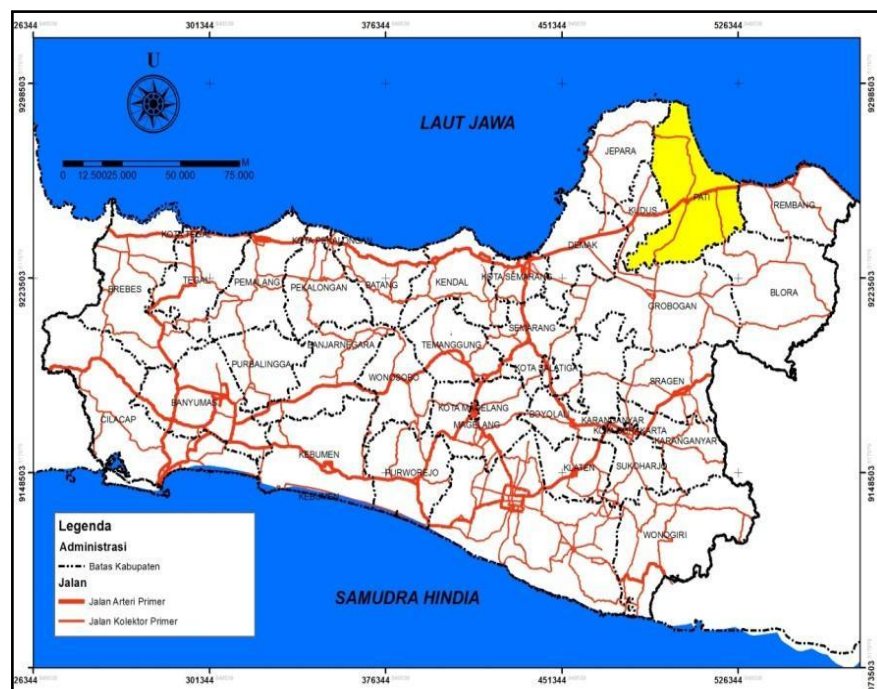
**RPJMD  
KABUPATEN  
PATI**

## BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

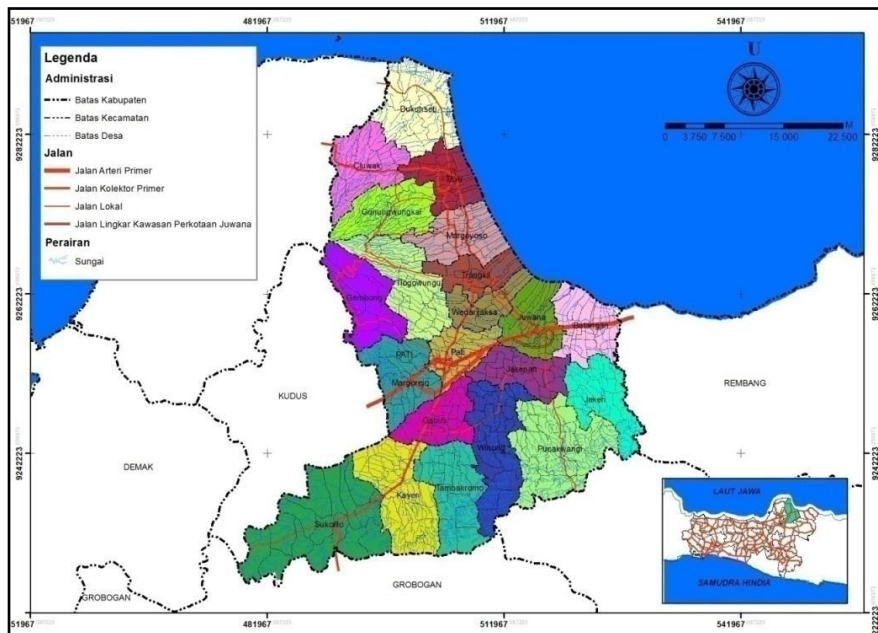
Kabupaten Pati secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian Timur Laut. Kota Pati, Juwana, dan Tayu dalam perencanaan pengembangan wilayah (struktur ruang) Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk rencana pola ruang Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Pati merupakan salah satu kawasan lindung geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo. Untuk kawasan budidaya, wilayah Kabupaten Pati diarahkan untuk pengembangan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan rakyat, serta lahan pertanian pangan berkelanjutan.



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.

**Gambar II.1**  
**Peta Kedudukan Kabupaten Pati dalam Kancah Regional**  
**Provinsi Jawa Tengah**

- 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi.  
Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 150.368 Ha (1.503,68 km<sup>2</sup>) dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:
  - a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
  - b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang;
  - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora;
  - d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara.Secara administratif terbagi atas 21 kecamatan sebagaimana digambarkan dalam peta berikut ini:



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.

**Gambar II.2**  
**Peta Administrasi Wilayah Kecamatan Kabupaten Pati**

Gambaran mengenai luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.1**  
**Luas Kecamatan di Kabupaten Pati**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas / Area (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Sukolilo	16	158,74	10,56
2	Kayen	17	96,03	6,39
3	Tambakromo	18	72,47	4,82
4	Winong	30	99,94	6,65
5	Pucakwangi	20	122,83	8,17
6	Jaken	21	68,52	4,56
7	Batangan	18	50,66	3,37
8	Juwana	29	55,93	3,72
9	Jakenan	23	53,04	3,53
10	Pati	24/5	42,49	2,83
11	Gabus	24	55,51	3,69
12	Margorejo	18	61,81	4,11
13	Gembong	11	67,30	4,48
14	Tlogowungu	15	94,46	6,28
15	Wedarijaksa	18	40,85	2,72
16	Trangkil	16	42,84	2,85
17	Margoyoso	22	59,97	3,99
18	Gunungwungkal	15	61,80	4,11
19	Tayu	13	69,31	4,61
20	Cluwak	21	47,59	3,16
21	Dukuhseti	12	81,59	5,43
TOTAL		406	1.503,68	100,00

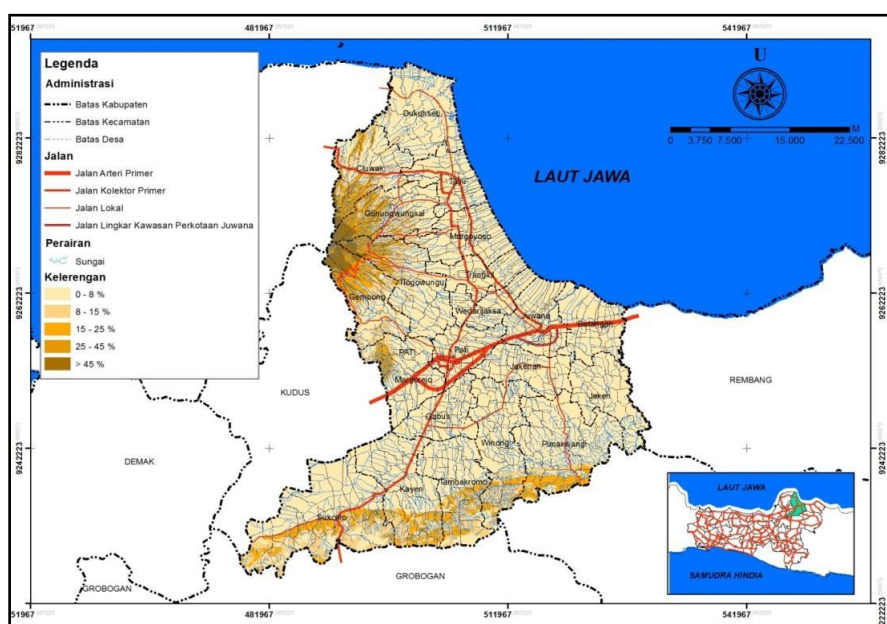
Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka, 2016.

2) Letak dan Kondisi Geografis.

Secara astronomis, Kabupaten Pati terletak antara 6°25'2" - 7°00'2" Lintang Selatan dan antara 100°50'2"-111°15'2" Bujur Timur. Gambaran kekhasan posisi Kabupaten Pati yang berpotensi memberikan keuntungan komparatif yaitu posisi Pati yang berada di jalur Pantura yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap.

3) Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu: lereng Gunung Muria, membentang sebelah barat bagian Utara; daratan rendah, membujur di tengah sampai Utara; serta pegunungan kapur yang membujur di sebelah Selatan. Kabupaten Pati memiliki variasi ketinggian antara 2–624 mdpl, daerah terendah adalah Kecamatan Gabus antara 2–8 mdpl, sedangkan daerah tertinggi adalah kecamatan Tlogowungu antara 38–624 mdpl yang merupakan wilayah lereng Gunung Muria.



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.

**Gambar II.3**  
**Peta Topografi Kabupaten Pati**

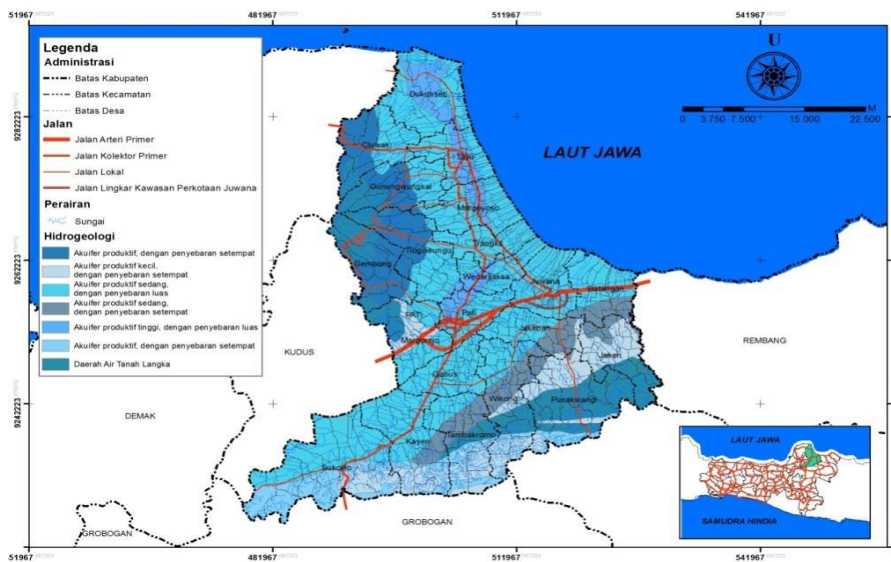
Wilayah Kabupaten Pati didominasi oleh daerah dataran rendah dengan kemiringan antara 0-5° yang berada di wilayah Kecamatan Tayu, Wedarijaksa, Jaken, Kayen, Pucakwangi, Tambakromo, Sukolilo, Dukuhseti, Trangkil, Pati, Juwana, Batangan, Margorejo, Gabus, Winong, Margoyoso dan Jakenan.

4) Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Pati ditandai dengan adanya wilayah perbukitan dan dataran rendah. Daerah perbukitan secara geologi disusun oleh batuan sedimen klasik, sedimen gunung api dan intrusi batuan andesit. Sedangkan untuk daerah dataran rendah berupa alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir lanau dan lempung.

5) Hidrologi

Ketersediaan sumber air di Kabupaten Pati cukup besar didukung keberadaan sungai yang tersebar di seluruh wilayah. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Namun demikian, pada musim kemarau kebanyakan dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan. Sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap.



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.

**Gambar II.4**  
**Peta Hidrogeologi Kabupaten Pati**

Aquifer produktif tersebar di sebagian besar Kecamatan Gembong, Tlogowungu, dan Gunungwungkal serta sebagian kecil Kecamatan Cluwak. Adapun aquifer produktif tinggi yang sudah dimanfaatkan tersebar di sebagian Kecamatan Pati, Wedarijaksa, Margoyoso, dan Dukuhseti.

6) Klimatologi

Temperatur tertinggi di Kabupaten Pati adalah 34°C dan terendah 23°C. Berdasarkan data iklim diketahui rata-rata curah hujan bulanan di Kabupaten Pati berkisar 283,92 mm. Rata-rata curah hujan (mm) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.2**  
**Rata-Rata Curah Hujan Perhari (mm) Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No.	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	20,20	20,80	42,05	21,85	76,06
2	Februari	16,25	24,44	17,33	24,46	175,66
3	Maret	18,43	23,39	16,78	23,38	106,42
4	April	23,50	26,04	14,60	26,08	119,93
5	Mei	17,63	28,13	16,00	28,10	67,23
6	Juni	14,00	19,55	16,86	19,50	75,13
7	Juli	0,00	15,88	21,00	15,86	49,97
8	Agustus	0,00	21,24	5,38	74,33	22,97
9	September	0,67	52,52	11,00	4,04	55,23
10	Oktober	13,67	13,67	8,00	13,60	158,97
11	Nopember	14,78	17,62	22,14	17,64	121,27
12	Desember	15,43	33,41	25,59	33,39	141,45

Sumber: Kabupaten Pati dalam Angka, 2017

## 7) Penggunaan Lahan

Lahan di Kabupaten Pati digunakan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung.

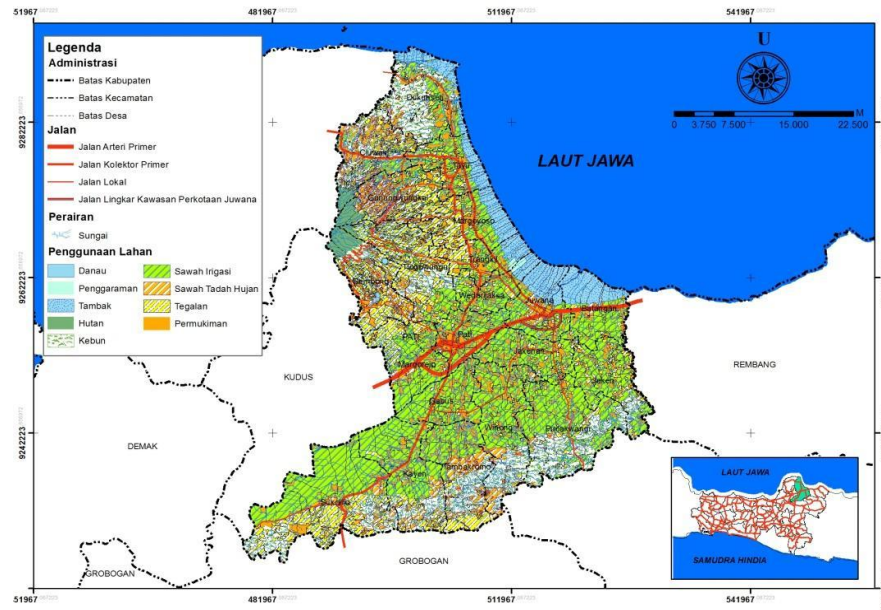
### a) Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan untuk kawasan budidaya di Kabupaten Pati dapat dikategorikan menjadi: peruntukan permukiman, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Peruntukan permukiman tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi tertinggi terdapat di Kecamatan Pati dan Juwana. Peruntukan pertanian untuk persawahan irigasi tersebar di daerah dataran rendah, sedangkan untuk persawahan tadah hujan terdapat di sebagian Kecamatan Tambakromo dan Cluwak, serta tegalan terdapat di sebagian Kecamatan Tlogowungu, Gembong, Margorejo, Trangkil, Margoyoso, dan Gunungwungkal. Peruntukan perkebunan tersebar di sepanjang kawasan Pegunungan Kendeng dan sebagian Kecamatan Dukuhseti. Peruntukan perikanan budidaya tersebar di sepanjang wilayah pantai.

### b) Kawasan Lindung

Peruntukan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung di lereng Gunung Muria yang terdapat di sebagian Kecamatan Tlogowungu, Cluwak, Gembong, dan Gunungwungkal. Kawasan tersebut juga berfungsi sebagai kawasan resapan air yang melindungi kawasan di bawahnya. Kawasan lindung lainnya adalah Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo yang terdapat di sebagian Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo. Kawasan perlindungan setempat meliputi: sempadan pantai di sepanjang kawasan pantai; sempadan sungai di sepanjang sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Pati; sempadan waduk di sekitar Waduk Gunungrowo dan Seloromo di Kecamatan Gembong; sempadan mata air di sekitar mata air di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Pati ditampilkan pada peta berikut:



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.

**Gambar II.5**  
**Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pati**

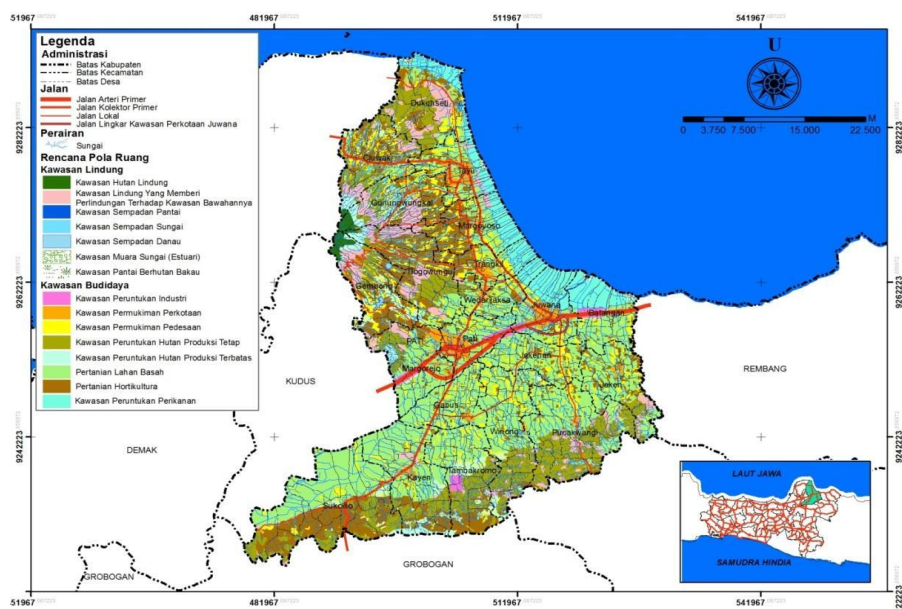
**b. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi wilayah di Kabupaten Pati sebagaimana disebut dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 yang dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung.

- 1) Pengembangan kawasan budidaya
  - a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi  
Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dibagi menjadi hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.
  - b) Kawasan Peruntukan Pertanian  
Pengembangan pertanian ditujukan untuk pertanian lahan basah (sawah) dan hortikultura.
  - c) Kawasan Peruntukan Perkebunan  
Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan meliputi kecamatan: Margorejo, Gembong, Margoyoso, Gunungwungkal, Cluwak, dan Dukuhseti.
  - d) Kawasan Peruntukan Perikanan  
Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas: perikanan tangkap, perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air tawar, dan pengolahan ikan.
  - e) Kawasan Peruntukan Pertambangan  
Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi:
    - Potensi bahan tambang besi di Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu.
    - Potensi bahan tambang fosfat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.
    - Potensi bahan tambang kalsit di Kecamatan Kayen
    - Potensi bahan tambang batu gamping untuk semen di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.
    - Potensi bahan tambang tras di Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Cluwak.

- Potensi bahan tambang sirtu di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Tayu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Winong.
- f) Kawasan Peruntukan Industri
- Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, menengah, kecil dan industri rumah tangga.
- Pengembangan industri besar dan menengah, industri manufaktur berlokasi di Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Pati.
  - Industri manufaktur dan perikanan yang berlokasi di Kecamatan Batangan dan Kecamatan Juwana.
  - Industri agro dan pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Tayu, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo.
  - Pengembangan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.
- g) Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, pariwisata religi, dan pariwisata buatan.
- h) Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan peruntukan permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan di masing-masing kecamatan yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
- i) Pengembangan Kawasan Lindung
- Pengembangan kawasan lindung diarahkan untuk pengelolaan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pati ditampilkan pada gambar berikut:



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.

**Gambar II.6**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati**



### **c. Wilayah Rawan Bencana**

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten dengan risiko tinggi terhadap bencana. Berdasarkan data IRBI 2013, indeks risiko bencana Kabupaten Pati sebesar 174 dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Pati 2014, terdapat beberapa potensi bencana di Kabupaten Pati yaitu, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Adapun persebaran potensi bencana berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan rawan banjir di Kabupaten Pati,  
Potensi bencana banjir di Kabupaten Pati secara umum tinggi karena tersebar hampir di tiap kecamatan di Kabupaten Pati terutama yang berada di sepanjang pesisir pantai diantaranya Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, dan Batangan, serta kecamatan yang dilalui Sungai Juwana diantaranya, Kecamatan Jakenan, Juwana, Pati, Winong, Tambakromo, Margorejo, Gabus, Kayen, dan Sukolilo.
- 2) Kawasan rawan bencana tanah longsor,  
Ancaman bencana longsor di Kabupaten Pati secara umum terdapat di dua area yaitu area Utara yang berada di lereng Gunung Muria di antaranya Kecamatan Gunungwungkal, Cluwak, Tlogowungu dan Gembong, serta area Selatan yang terdapat pada perbatasan Selatan Kabupaten Pati dengan kabupaten lain diantaranya Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Jaken, dan Pucakwangi.
- 3) Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Pati  
Wilayah dengan ancaman bencana kekeringan meliputi beberapa wilayah di sisi Selatan yaitu, di sebagian Kecamatan Kayen, Jaken, dan Gabus.
- 4) Kawasan rawan angin puting beliung di Kabupaten Pati meliputi:  
Wilayah dengan status risiko tinggi tersebar di wilayah Selatan terutama di Kecamatan Tambakromo Kecamatan Kayen, Gabus, Jakenan, dan Sukolilo.
- 5) Kawasan rawan gempa di Kabupaten Pati  
Beberapa wilayah di Kabupaten Pati dilewati oleh patahan, sehingga berpotensi mengalami bencana gempa bumi, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Wedarijaksa, Juwana, Pati, Gabus, Margorejo, Kayen, dan Sukolilo.
- 6) Kawasan rawan bencana gelombang pasang  
Kawasan rawan bencana gelombang pasang terdapat di sepanjang pesisir pantai, meliputi Kecamatan Dukuhseti Kecamatan Tayu, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, Juwana, dan Batangan.

Gambaran peristiwa bencana alam dan wabah penyakit serta perkiraan kerugian yang ditimbulkan di Kabupaten Pati selama periode Tahun 2012-2016 ditampilkan berikut.

**Tabel II.3**  
**Peristiwa Bencana Alam dan Wabah Penyakit di Kabupaten Pati Tahun 2012 -2016**

No	Keterangan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Lokasi Bencana di Kabupaten Pati	NA	217	333	63	85
2.	Perkiraan kerugian akibat bencana (juta rupiah)	NA	19.157,49	1.643.413,66	756.354,45	890.467
3.	Jumlah wabah/Endemi pada manusia (kasus)					
	b. Demam Berdarah	303	569	280	923	1.226
	c. Hepatitis	NA	NA	71	92	158
	d. Tuberkolosis	633	544	495	372	104

*Sumber: Dinas Kesehatan dan BPBD Kabupaten Pati, 2017.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa bencana terjadi setiap tahun dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Nilai kerugian akibat bencana pada tahun 2014 terlihat paling besar dibanding tahun-tahun lainnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 terjadi bencana banjir besar di Kabupaten Pati yang melanda 182 desa/kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan mengakibatkan 48.846 rumah terendam dan 45.697 jiwa penduduk mengungsi. Bencana ini diikuti bencana tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan pada talud jalan maupun tanggul sungai.

Besarnya nilai kerugian akibat bencana maupun banyaknya penduduk terdampak bencana menunjukkan bahwa indek kerentanan dalam menghadapi bencana tinggi, sedangkan indek kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah. Oleh karena itu untuk menurunkan indek risiko bencana diperlukan strategi peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

**d. Kondisi Demografi**

Berdasarkan proyeksi BPS Kabupaten Pati, jumlah penduduk pada tengah tahun 2016 sebanyak 1.239.989 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 825 jiwa/km<sup>2</sup>. Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga beban lingkungan hidup juga semakin tinggi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.4**  
**Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati Tahun 2011-2016**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa / km <sup>2</sup> )
2012	1.207.399	803
2013	1.218.016	810
2014	1.225.594	815
2015	1.232.889	820
2016*	1.239.989	825

*Sumber: BPS Kabupaten Pati 2013-2017*

Perbandingan kepadatan penduduk kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan Kabupaten Pati memiliki kepadatan penduduk

relatif rendah. Berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2017, kepadatan penduduk Kabupaten Pati (825 jiwa/km<sup>2</sup>) menempati urutan ke-8 kepadatan penduduk terendah dari 29 kabupaten lainnya, setelah Kabupaten Blora (475), Wonogiri (521), Rembang (611), Grobogan (684), Purworejo (686), Wonosobo (789), dan Cilacap (792).

Sex Ratio penduduk Kabupaten Pati Tahun 2016 sebesar 93,97, artinya setiap 100 perempuan dalam suatu kawasan di Kabupaten Pati, akan terdapat pula sebanyak 94 pria di dalamnya sehingga bisa dikatakan cukup seimbang. Gambaran jumlah penduduk Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin periode 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Jenis Kelamin	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Laki-Laki	586.531	590.181	593.810	597.314	600,723
Perempuan	620.529	627.835	631.784	635.598	639,266
Jumlah Total	1.207.060	1.218.016	1.225.594	1.232.912	1.239.989
Laju Pertumbuhan (%)	0,71	0,91	0,62	0,60	0,57

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2013-2017

Berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka tahun 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati menempati urutan ke-14 diantara 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 2012-2016, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati cenderung menurun.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian di suatu daerah sangat tergantung pada sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Salah satu sumber daya daerah yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah penduduk. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap dan tingkat kesejahteraan penduduk. Berikut adalah gambaran penduduk usia kerja di Kabupaten Pati periode 2012-2016.

**Tabel II.6**  
**Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Tahun	Angkatan Kerja (orang)		Bukan Angkatan Kerja (orang)	Penduduk Usia Kerja/ Tenaga Kerja (orang)
	Bekerja	Mencari Kerja (Pengangguran)		
2012	562.487	78.177	262.503	903.167
2013	594.736	46.863	259.583	901.182
2014	607.933	41.390	293.015	942.338
2015	617.299	28.613	306.283	952.195
2016*	627.652	26.979	307.294	961.925

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013-2016 dan Disnaker Kabupaten Pati 2017.  
Catatan: 2016\* data diolah Pusdatin Kemnaker RI.

Berdasarkan gender, sekitar 75% bukan angkatan kerja adalah perempuan, dimana persentase tersebut yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga adalah sekitar 75%, menunjukkan produktivitas perempuan rendah. Beberapa indikator yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, sedangkan TPT yang tinggi menunjukkan terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

**Tabel II.7**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Tahun	Penduduk Usia Kerja / Tenaga Kerja (orang)	Angkatan Kerja (orang)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2012	903.167	640.664	70,94
2013	901.182	641.599	71,20
2014	942.338	649.323	68,91
2015	952.195	645.912	67,83
2016*	961.925	654.631	68,05

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2016 dan Disnaker Kab. Pati 2017. (Catatan: 2016\* data diolah Pusdatin Kemnaker RI).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penurunan angkatan kerja. Penurunan drastis tingkat pengangguran terjadi di tahun 2013. Hal ini dikarenakan survey di tahun 2012 dilakukan berdekatan dengan hari raya, sehingga penduduk usia kerja yang merantau ke luar wilayah Kabupaten Pati berada di rumah dan meningkatkan persentase pengangguran.

**Tabel II.8**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Tahun	Mencari Kerja (pengangguran) (orang)	Angkatan Kerja (orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2012	78.177	640.664	12,20
2013	46.863	641.599	7,30
2014	41.390	649.323	6,37
2015	28.613	645.912	4,43
2016*	26.979	654.631	4,12

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2016 dan Disnaker Kab. Pati 2017. (Catatan: 2016\* data diolah Pusdatin Kemnaker RI).

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan daerah baik propinsi maupun kota/kabupaten. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan

ekonomi daerah, peningkatan kualitas pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah serta menjaga stabilitas daerah.

Upaya kesejahteraan memerlukan sinergi antarsektor ekonomi strategis sehingga tercipta stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta menghasilkan SDM yang potensial dan produktif. Keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rendahnya pengangguran, dan turunnya Tingkat Kemiskinan Masyarakat.

**a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

1) Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

**Tabel II.9**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

Lapangan Usaha		2012		2013		2014		2015*		2016**	
		Rp (Miliar)	Pert. (%)	Rp (Miliar)	Pert. (%)	Rp (Miliar)	Pert. (%)	Rp (Miliar)	Pert. (%)	Rp (Miliar)	Pert. (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.678,00	5,41	5.902,45	3,95	5.833,74	-1,16	6.281,19	7,67	6.531,66	3,99
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4.824,09	5,62	4.986,43	3,37	4.858,43	-2,57	5.247,18	8,00	5.441,85	3,71
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	85,95	0,43	86,76	0,93	89,77	3,47	88,69	1,20	87,46	1,38
3	Perikanan	767,96	4,70	829,26	7,98	885,55	6,79	945,32	6,75	1.002,35	6,03
B	Pertambangan dan Penggalian	378,09	7,75	405,31	7,2	430,8	6,29	441,03	2,38	461,02	4,53
C	Industri Pengolahan	5.520,58	7,19	5.984,88	8,41	6.380,18	6,6	6.680,75	4,71	6.991,05	4,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22,16	9,9	24,15	9,17	26,46	9,35	27,33	3,29	28,67	4,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,86	-1,75	14,64	-1,47	15,36	4,89	15,63	1,76	16,23	3,84
F	Konstruksi	1.647,92	6,66	1.739,01	5,53	1.813,76	4,3	1.908,07	5,2	2.012,25	5,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.178,82	1,9	3.287,46	4,05	3.500,93	5,85	3.658,74	4,51	3.843,15	5,04
H	Transportasi dan Pergudangan	586,05	7,37	642,67	9,68	706,54	9,92	761,83	7,83	816,95	7,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	719	8,08	760,94	5,83	817,59	7,45	879,85	7,62	952,05	8,21
J	Informasi dan Komunikasi	445,75	9,82	486,92	9,24	583,47	19,8	640,89	9,84	702,54	9,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	521,22	3,04	546,76	4,9	566,83	3,67	601,84	6,18	644,14	7,03
L	Real Estate	227,77	4,97	242,82	6,61	258,94	6,64	276,72	6,87	295,12	6,65
M,N	Jasa Perusahaan	40,58	8,27	45,43	11,94	49,16	8,22	53,25	8,32	58,31	9,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	785,39	1,31	805,32	2,54	817,15	1,47	858,77	5,09	895,35	4,26
P	Jasa Pendidikan	751,9	18,58	825,9	9,84	913,56	10,6	983,64	7,67	1.054,75	7,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177,5	8,33	190,04	7,06	210,41	10,7	226,28	7,54	246,57	8,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	376,73	6,02	404,87	7,47	440,34	8,76	456,54	3,68	490,14	7,36
PDRB Total		21.072,32	5,93	22.329,69	5,97	23.365,21	4,64	24.752,33	5,94	26.039,96	5,2

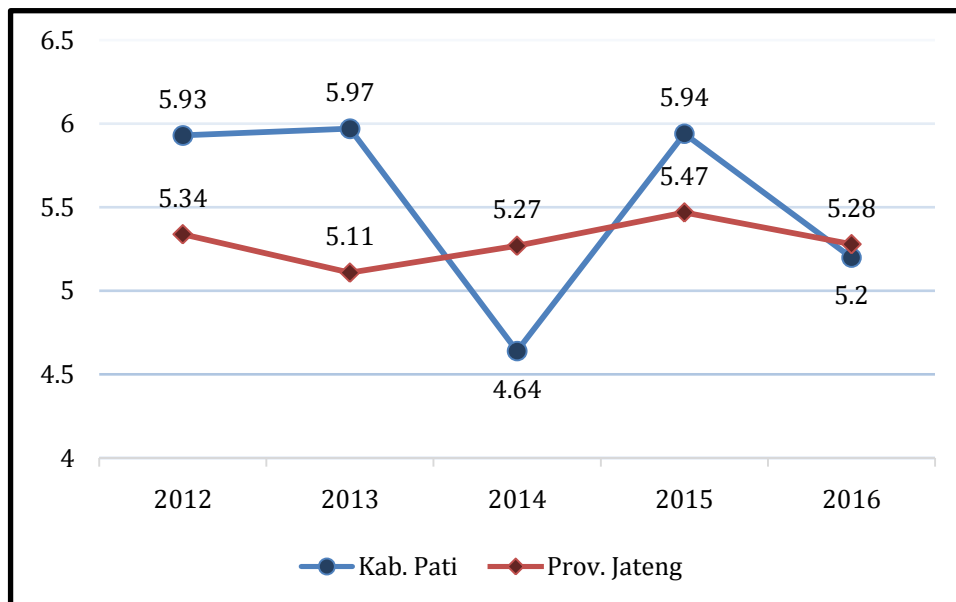
Sumber: BPS Kabupaten Pati 2017

**Tabel II.10**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

LAPANGAN USAHA		2012		2013		2014		2015*		2016**	
		Rp (jt)	Pert (%)	Rp (jt)	Pert (%)	Rp (jt)	Pert (%)	Rp (jt)	Pert (%)	Rp (jt)	Pert (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.470.381	12,20	7.124.440	10,11	7.486.269	5,08	8.454.569	12,93	8.978.290	6,19
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.512.661	13,03	6.023.824	9,27	6.240.205	3,59	7.092.543	13,66	7.497.680	5,71
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	94,143	1,12	102,957	9,36	117,123	13,76	121,546	3,78	122,361	0,67
3	Perikanan	863,577	8,40	997,659	15,53	1.128.941	13,16	1.240.481	9,88	1.358.248	9,49
B	Pertambangan dan Penggalian	408,655	11,33	457,856	12,04	542,625	18,51	602,451	11,03	649,606	7,83
C	Industri Pengolahan	6.182.885	12,80	7.029.437	13,69	7.871.692	11,98	8.431.400	7,11	9.096.699	7,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22,883	11,61	24,234	5,90	27,039	11,58	29,135	7,75	31,912	9,53
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	14,998	-1,68	15,086	0,59	15,908	5,45	17,02	6,99	17,937	5,39
F	Konstruksi	1.771.626	9,48	1.931.976	9,05	2.157.142	11,65	2.362.219	9,51	2.533.627	7,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.414.408	3,63	3.695.913	8,24	4.034.969	9,17	4.333.538	7,40	4.664.663	7,64
H	Transportasi dan Pergudangan	589,568	7,76	653,423	10,82	766,105	17,26	863,075	12,66	926,3	7,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	782,525	11,91	872,249	11,47	967,003	10,86	1.056.412	9,25	1.195.970	13,21
J	Informasi dan Komunikasi	438,48	7,37	471,773	7,59	560,925	18,90	612,918	9,27	674,157	9,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	585,071	11,88	638,054	9,06	688,506	7,91	757,256	9,99	835,234	10,30
L	Real Estate	233,822	5,60	253,891	8,58	286,247	12,74	316,782	10,67	349,149	10,22
M,N	Jasa Perusahaan	44,709	11,71	52,336	17,06	58,878	12,50	65,016	10,42	73,263	12,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	870,614	10,25	951,85	9,33	1.024.708	7,65	1.110.128	8,34	1.188.846	7,09
P	Jasa Pendidikan	922,064	29,19	1.075.213	16,61	1.226.825	14,10	1.366.893	11,42	1.496.127	9,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	202,529	15,91	232,505	14,80	269,45	15,89	296,783	10,14	326,61	10,05
R,S,T, U	Jasa Lainnya	404,819	10,27	451,215	11,46	520,568	15,37	548,854	5,43	608,218	10,82
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		23.325.038	10,98	25.931.378	11,01	28.504.862	9,92	31.224.449	9,54	33.646.610	7,76

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2013-2017

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan bahwa Tahun 2012 sebesar 5,93 meningkat menjadi 5,97 di tahun 2013, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan drastis menjadi 4,64. Hal ini disebabkan karena terjadinya bencana banjir besar dan tanah longsor di 18 kecamatan yang menyebabkan lapangan usaha khususnya pertanian mengalami pertumbuhan negatif. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan normal kembali ke angka 5,94 dan di tahun 2016 menurun kembali ke angka 5,2. Pertumbuhan tahun 2016 ini mendekati pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,28. Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Olah data PDRB Kabupaten Pati, 2016.

**Gambar II.8**  
**Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati**  
**dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah**

2) Laju Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Namun demikian, inflasi yang terlalu rendah mengakibatkan investor enggan berinvestasi. Tingkat inflasi di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.11**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Inflasi	
		Pati	Jateng
1	2012	3,92	4,24
2	2013	7,57	7,99
3	2014	8,01	8,22
4	2015	3,23	2,73
5	2016	2,31	2,36

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2013-2017.

Secara umum inflasi di Kabupaten Pati masih lebih rendah dibanding



inflasi di Jawa Tengah, kecuali di tahun 2015. Di tahun 2014, Kabupaten Pati mengalami peningkatan inflasi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti kenaikan harga BBM, bencana alam, dan tarif listrik sehingga meningkatkan harga-harga kebutuhan.

### 3) Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Pati. Salah satu parameter untuk mengukur kemiskinan adalah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin Kabupaten Pati periode 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel II.12**  
**Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2012	288.271	13,61
2	2013	314.609	12,94
3	2014	332.228	12,06
4	2015	347.575	11,95
5	2016	377.442	11,65

*Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2013-2017*

Permasalahan dalam pengukuran kemiskinan adalah belum tersedianya basis data yang terintegrasi sehingga upaya penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial. Selain itu, belum terjadi pemerataan pembangunan yang dibuktikan dengan masih tingginya persentase desa sangat tertinggal dan tertinggal (53,11%). Permasalahan kemiskinan juga berkaitan dengan kualitas SDM, dimana rata-rata lama sekolah masih rendah (6,83) di tahun 2016. Kesenjangan gender masih terjadi dimana angka melahirkan perempuan usia 15-19 tahun masih 30%. Kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana juga mempengaruhi kinerja penurunan kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan di tahun 2014. Pada tahun tersebut terjadi bencana banjir hampir di seluruh wilayah yang mengakibatkan penurunan kemiskinan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun lain.

## b. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk. IPM Kabupaten Pati dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.13**  
**Perkembangan IPM di Kabupaten Pati Tahun 2011-2016**

No	Tahun	IPM	
		Provinsi Jateng	Kabupaten Pati
1	2012	67,21	66,13
2	2013	68,02	66,47
3	2014	68,78	66,99
4	2015	69,49	68,51
5	2016	69,98	69,03

*Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2017.*

IPM Kabupaten Pati menunjukkan kinerja meningkat. Namun demikian, masih terdapat aspek yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya peningkatan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan kemampuan ekonomi masyarakat.

2) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan prasyarat literasi informasi bagi masyarakat, sehingga perlu diprioritaskan penuntasannya. perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Pati periode 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.14**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	903.167	901.182	942.338	952.195	959.943
2	Angka Melek Huruf	87,59	89,56	92,11	91,00	91,08

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2013-2017

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. Capaian APK semua jenjang pendidikan di Kabupaten Pati periode 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.15**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
APK SD/MI (%)	112,06	112,06	112,8	112,68	112,80
APK SMP/MTs (%)	99,16	99,38	100,14	102	99,90
APK SMA/SMK/MA (%)	57,71	58,37	60,72	63,67	63,67

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2017.

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Hingga tahun 2015, capaian APM yang masih perlu ditingkatkan adalah jenjang SMA/SMK, dengan capaian sebesar 44,22%. Meskipun urusan pendidikan SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi, namun pemerintah Kabupaten Pati tetap perlu memantau dan mengadvokasi peningkatan tahun pendidikan yang ditamatkan penduduknya.

**Tabel II.16**  
**Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
APM SD/MI (%)	98,94	99,46	99,9	99,63	99,90
APM SMP/MTs (%)	78,17	78,83	80,84	81,37	81,37
APM SMA/SMK/MA (%)	39,79	39,91	42,11	44,22	48,22

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2017.

5) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Kasus Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pati tahun 2012-2016 fluktuatif dan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.17**  
**Angka Kematian Ibu (AKI)**  
**di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	AKI	109,52	157,25	94,78	117,26	115

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2017.

6) Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pati dari tahun 2012-2016 menurun.

Angka Kematian Balita (AKBa) dihitung berdasarkan jumlah kematian balita 0-5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Gambaran AKB dan AKBa ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel II.18**  
**Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita**  
**di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	AKB	13,9	10,84	9,87	9,32	10,84
2	AKBa	15,1	12,4	10,8	7,7	12,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2017.

7) Rasio penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan penduduk usia diatas 15 tahun yang bekerja dengan total jumlah penduduk usia diatas 15 tahun. Jumlah penduduk usia kerja, penduduk bekerja, dan rasio penduduk yang bekerja ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel II.19**  
**Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

Indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk Usia Kerja	903.167	901.182	942.338	952.195	961.631
Jumlah Penduduk Bekerja	562.487	594.736	607.933	617.299	627.652
Rasio Penduduk Bekerja	0,62	0,66	0,65	0,65	0,65

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 - 2016 (diolah).

Rasio penduduk bekerja dari tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif. Rasio penduduk bekerja di Kabupaten Pati pada tahun 2015 sama

dengan rasio penduduk bekerja Provinsi dengan Jawa Tengah sebesar 0,65. Dari data tersebut, masih ditemukan adanya gap 35% rasio penduduk bekerja.

8) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pembangunan gender (IPG) mencerminkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu IDG merepresentasikan tingkat keterwakilan perempuan dalam posisi pengambil keputusan maupun di dunia politik. IPG dan IDG Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.20**  
**IPG dan IDG Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

Indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
IPG	89,31	89,43	89,99	91,06	NA
IDG	63	65,99	65,95	65,74	NA

Sumber: Kementerian PPA 2017.

Baik IPG maupun IDG di Kabupaten Pati kurun 2012-2016 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan yang mengkondisikan perlakuan kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan di ranah publik. Namun demikian, masih rendahnya IDG menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam pengambilan keputusan dan keterwakilan politik. Keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Pati sebesar 32%, tetapi persentase perempuan di pemerintahan yang menduduki posisi eselon III atau di atasnya masih sebesar 17%.

**c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Kelompok seni yang ada di Kabupaten Pati terdiri dari kelompok seni tari, musik, vokal, teater, dan rupa. Informasi indikator fokus seni budaya dan olahraga di Kabupaten Pati periode 2012-2016 dan data per kecamatan tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.21**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	0.75	0.80	0.88	1.48	1.65
2	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	7.64	7.67	7.79	7.79	7.87
4	Jumlah tempat olahraga per 10.000 penduduk	10.25	10.34	10.46	10.47	10.54

Sumber: Dinporapar dan Disdikbud 2017

**Tabel II.22**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Pati Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per10.000 penduduk	Jumlah tempat olahraga per10.000 penduduk
1	Sukolilo	0.89	6.16	5.60
2	Kayen	0.69	6.49	7.74
3	Tambakromo	1.01	8.72	11.76
4	Winong	1.60	6.81	18.64
5	Pucakwangi	0.72	10.30	15.09
6	Jaken	2.57	7.03	15.47
7	Batangan	2.57	14.57	13.63
8	Juwana	2.20	8.55	9.71
9	Jakenan	3.92	8.84	17.68
10	Pati	1.78	13.72	9.77
11	Gabus	2.85	8.77	14.67
12	Margorejo	1.14	7.76	9.91
13	Gembong	1.13	5.90	8.17
14	Tlogowungu	1.77	6.73	9.90
15	Wedarijaksa	1.00	6.68	9.69
16	Trangkil	1.62	5.06	8.50
17	Margoyoso	0.55	7.29	9.76
18	Gunungwungkal	1.67	4.18	12.83
19	Cluwak	2.53	3.00	8.77
20	Tayu	1.53	8.89	10.42
21	Dukuhseti	2.43	6.27	6.79

*Sumber: Dinporapar dan Disdikbud 2017*

Data dan informasi Perkembangan kelompok seni berdasar kecamatan membantu perencanaan sosial budaya menuju Pati yang berwawasan kelestarian budaya lokal sebagai bagian dari eksistensi sebagai bangsa. Kelompok seni terbanyak berada di Kecamatan Pati. Kecamatan paling potensial untuk grup kesenian adalah Kecamatan Jakenan. Kecamatan Batangan unggul dari banyaknya klub olahraga. Sementara itu kecamatan Winong paling banyak memiliki fasilitas tempat oleh raga dibandingkan rasio jumlah penduduk.

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

#### a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

##### 1) Pendidikan

##### a) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

**Tabel II.23**  
**Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)**  
**Kabupaten Pati dengan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2012-2016**

No	Wilayah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jawa Tengah	6,77	6,8	6,93	7,03	7,15
2.	Kabupaten Pati	6,15	6,27	6,35	6,71	6,83

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2017

Pada tahun 2012 sampai tahun 2015 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pati di bawah Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah.

b) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak Indonesia, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan anak sejak usia dini sehingga tumbuh kembang, perkembangan emosional, dan psikomotorik anak menjadi terpantau dan terbina.

Kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. Cakupan APK PAUD dihitung untuk anak rentang usia 3-6 tahun. APK) PAUD kabupaten Pati di tahun 2014 adalah 53,28%, meningkat menjadi 60,18% di tahun 2015, namun turun menjadi 45,30% di tahun 2016. Penurunan APK PAUD kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya persentase anak usia 5-6 tahun yang telah bersekolah SD (68%).

c) Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pendidikan dasar 9 tahun, merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan 9 tahun diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan, Angka Putus Sekolah, jumlah guru, jumlah murid dan jumlah sekolah.

Secara rinci capaian APK serta APM SD sederajat dan SMP sederajat terlihat pada Tabel berikut:

**Tabel II.24**  
**Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Partisipasi Kasar SD sederajat	112,06	112,06	112,80	112,68	112,80
2	Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat	99,16	99,38	100,14	102,00	99,90
3	Angka Partisipasi Murni SD sederajat	98,94	99,46	99,90	99,63	99,90
4	Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	78,17	78,83	80,84	81,37	81,37

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2017.

d) Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah (APS). APS menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu, seperti alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya atau alasan faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang kurang mendukung yaitu kebiasaan anak-anak lebih suka bekerja karena menghasilkan uang daripada belajar di sekolah. Secara rinci perkembangan Angka Putus Sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Pati terlihat pada tabel berikut:

**Tabel II.25**  
**Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan**  
**SMP Sederajat Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat (%)	0,22	0,03	0,14	0,04	0,02
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP Sederajat	0,14	0,1	0,19	0,17	0,08

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2017.

APS Kabupaten Pati menampakkan fluktuasi, hal ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan intervensi kebijakan pemerintah. Angka putus sekolah jenjang SMP lebih tinggi dibanding jenjang SD. Pada tahun 2014 tingkat inflasi di Pati tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir, menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat juga terganggu, termasuk untuk belanja biaya pendidikan. Pada tahun 2015 APS menurun karena inflasi daerah juga menurun, berarti kemampuan daya beli masyarakat membaik. Faktor budaya yang memperburuk keadaan adalah masih adanya kebiasaan anak perempuan menikah di usia dini, sehingga meningkatkan kegagalan melanjutkan sekolah. Data ini dapat dilihat dari tingginya kelahiran dengan ibu di usia kurang dari 17 tahun.

e) Angka Melanjutkan (AM)

Indikator Angka Melanjutkan merupakan indikator strategis untuk mengukur apakah semua lulusan SD sederajat melanjutkan ke SMP sederajat dan lulusan SMP sederajat melanjutkan ke Sekolah Menengah (SMA/SMK). Diharapkan semua lulusan SD sederajat melanjutkan ke SMP sederajat, dan semua lulusan SMP sederajat melanjutkan ke SM. Capaian AM ke SMP sederajat dan ke SM terlihat pada Tabel berikut.

**Tabel II.26**  
**Capaian Angka Melanjutkan SD Sederajat dan**  
**SMP Sederajat Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat (%)	98,75	108,22	100,89	123,9	102
2	Angka Melanjutkan ke Sekolah Menengah (SMA/SMK)(%)	58,26	84,98	84,76	84,95	85,60

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat lebih tinggi dibandingkan angka melanjutkan dari SMP sederajat ke SM (SMA/SMK). Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan yang masih lebih besar fokusnya pada pendidikan 9 tahun, sehingga biaya melanjutkan ke SMA/SMK lebih besar dibanding biaya melanjutkan ke SMP. Akibatnya, risiko tidak melanjutkan sekolah lebih besar pada jenjang melanjutkan ke SMA/SMK (pendidikan 12 tahun). rendahnya AM ke SMA/SMK dikarenakan setelah lulus SMP sederajat, penduduk usia (15-19) memilih untuk bekerja, sebagaimana ditunjukkan oleh data SAKERNAS tahun 2015 bahwa angkatan kerja usia 15-19 tahun sebesar 27,8%.

- f) Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
 Secara rinci perkembangan guru yang memiliki kualifikasi D4/S1 terlihat pada Tabel berikut:

**Tabel II.27**  
**Persentase Pendidik dengan kualifikasi D4/S1**  
**Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	69,13	76,78	83,00	84,83	88,05
2	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,78	84,12	87,47	89,69	91,39
3	Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86,05	90,97	91,40	92,41	92,82
4	Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	78,65	83,96	87,29	88,98	90,75

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2017.

Tabel di atas menggambarkan bahwa secara keseluruhan kualifikasi guru di Kabupaten Pati masih perlu ditingkatkan, karena belum 100% kualifikasi pendidikan S1/D4. Namun demikian dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan persentase guru berpendidikan S1/D4. Sedangkan gambaran tentang kecukupan akses pendidikan di Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel II.28**  
**Indikator Kecukupan Akses Pendidikan**  
**di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,58	100	99,99	100	99,96
2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,62	99,85	99,85	99,67	99,82
3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,78	99,85	99,85	99,96	99,97
4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,75	108,22	100,89	123,9	102
5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	58,26	84,98	84,76	84,95	85,6
6.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	64,61	63,41	63,08	61,82	62,56
7.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	83,51	70,05	74,92	83,4	79,03
8.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	65,15	65,65	68,54	67,15	68,52
9.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	15,80	15,73	16,69	16,99	16,27
10.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:08	1:10	1:12	1:12	1:12
11.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	1:09	1:10	1:11	1:10	1:12
12.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:09	1:10	1:11	1:11	1:13
13.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	97,90	97,15	99,93	99,98	99,93
14.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	NA	90,38	100	99,42	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Pati, 2017

## 2) Kesehatan

Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat. Pencapaian kinerja urusan kesehatan tahun 2012-2016 dengan mendasarkan beberapa indikator yang diatur dengan beberapa peraturan perundangan yang berlaku dapat diidentifikasi pada tabel berikut:

**Tabel II.29**  
**Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan**  
**Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Kasus Kematian Bayi	kasus	214	202	177	167	188

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
2	Kasus Kematian Balita	kasus	231	228	193	198	218
3	Kasus Kematian Ibu	kasus	22	29	17	21	20
4	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100	100	100
5	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	1,48	1,48	4,36	4,30	3,87
6	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	%	56,46	56,46	131,8 <sub>4</sub>	101,2 <sub>4</sub>	116,9
8	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kh	13,9	8	7,64	6,92	4,73
9	Rasio posyandu per satuan balita	%	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
10	Prevalensi balita gizi kurang	%	6,14	6,91	6,27	6	6,16
11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100 173 ks	100 102 ks	100 85 ks	100 71 ks	100 94 ks
13	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	62,45	64,8	71,53	72,1	70,28
14	Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	99,96	96,29	99,64	99,99	100
15	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	6,238	4,082	9,287	29,0	29,0
16	Persentase neonatus Risiko Tinggi	%	8,22	10,12	10,52	15,48	11,43
17	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	55,78	96,6	65,07	102,06	76,2
18	Cakupan kunjungan bayi	%	82,86	76,81	99,32	100	100
19	Cakupan pelayanan anak balita	%	82,86	100	81,6	95,86	88
20	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100	100	98,98	100	100
21	Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	100	100	100
22	Persentase kehamilan dengan Risiko Tinggi	%	16,03	18,27	18,12	22,16	23,68
23	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	80,16	91,34	90,62	103,04	118
24	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	97,51	92,27	93,68	97,25	94,4

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
25	Cakupan pelayanan nifas	%	97,53	93,5	96,88	92,69	99,2
26	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	98,15	95,32	99,93	98,23	100
27	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	91,78	90,4	92,62	89,92	83,68
28	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	30,03	63,7	72,3	72,7	72,7
29	Cakupan Rumah Sehat	%	58,19	59,42	61,97	63,35	64,29
30	Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan	%	100	77,7	73,95	91,67	100
31	Cakupan penggunaan Sarana air limbah dan jamban keluarga yang memenuhi syarat	%	58,82	59,62	60,55	89,83	90,6
32	Prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	angka	0,047	0,04	0,038	0,028	0,008
33	Persentase kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,2	2,9	1,74	1	1
34	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	%	22,85	46,76	12,19	21,56	21,56
35	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS ( <i>success rate</i> )	%	6,4	7,5	77,32	75,04	31,34
36	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	46,76	9,91	12,19	21,56	21,56
37	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
38	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	angka	-	29	59	37	50
39	Jumlah kasus AIDS(Data L/P/kelempok umur terlampir)	kasus	-	72	97	64	129
39	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat <i>antiretroviral</i>	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
40	Angka kejadian malaria per 100.000 penduduk	%	24,8	0,1	0,1	0,48	0,48
41	Penderita diare yang ditangani	%	5,029	84,1	84,5	68,2	13,8
42	<i>Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate</i>	%	1,8	2,4	1,07	2,38	1,06
43	Jumlah Kasus penderita gangguan jiwa pasung	kasus	NA	NA	NA	20	19
44	Rasio dokter per satuan penduduk	/100.000 pend	11,7	11,7	11,74	12,27	12,5
45	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	angka	1,448	1,448	1,448	1,448	1,448
46	Proporsi Puskesmas PONEC sesuai standar	%	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24
47	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	angka	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
48	Proporsi RS terakreditasi	%	14,2	14,2	14,2	20	20
49	Proporsi RS PONEC	%	10	10	10	10	10
50	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
51	BOR ( <i>Bed Occupancy Ratio</i> )	%	70,79	73,7	74,78	75,55	65,9
52	AVLOS ( <i>Average Length of Stay</i> = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	Hari	3,7	3,9	4	3,9	3,27
53	TOI ( <i>Turn Over Interval</i> )		1,5	1,4	1,3	1,3	1,9
54	BTO ( <i>Bed Turn Over</i> = Angka perputaran tempat tidur)	%	68,8	62,7	68,7	70,1	67,06
55	NDR ( <i>Net Death Rate</i> )	%	21,3	16,7	19,2	19,2	10,8
56	Cakupan peserta KB aktif	%	70,65	74,27	77,63	82,71	86,5
57	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100
58	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	9	30	5	5	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2017.

Secara umum kinerja kesehatan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan hasil. Hal ini terlihat dari penurunan angka indikator kesehatan yang bermakna negatif, seperti Angka Kematian, Angka

Kesehatan, kasus kesehatan. Di sisi lain, terjadi peningkatan capaian angka indikator yang berdimensi positif, seperti cakupan partisipasi masyarakat di bidang KB, Posyandu, perilaku penggunaan layanan kesehatan.

Namun demikian, beberapa capaian indikator kesehatan menunjukkan penurunan. AKB dan AKaBa Kabupaten Pati di tahun 2016 menunjukkan peningkatan di tahun sebelumnya. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu peningkatan persentase kehamilan dan neonatus Risiko Tinggi (Risti) serta penurunan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan komplikasi neonatus yang tertangani, dan cakupan anak balita.

Proporsi kasus TB yang berhasil diobati dalam program DOTS menunjukkan penurunan di tahun 2016. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kepatuhan minum obat para penderita TB yang masih rendah. Permasalahan kesehatan lainnya adalah meningkatnya kasus HIV/AIDS. Data 2016 menunjukkan peningkatan sekitar 100%, dimana sebagian besar kasus ditemukan pada usia produktif. Berdasarkan kajian dari Kantor Penelitian dan Pengembangan beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu tingkat pendidikan yang rendah, riwayat Penyakit Menular Seksual (PMS), jenis pekerjaan, serta kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.

Keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh rasio tenaga kesehatan yang ada. Ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pati per Desember 2016, sebagai berikut: dokter umum sebanyak 155 orang, dokter gigi 28 orang, perawat 1.067 orang, Bidan 729 orang. Berdasarkan Kepmenkes RI No. 81/Menkes/SK/I/2014 tentang pedoman penyusunan dan perencanaan SDMK di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit, rasio dokter yang ideal adalah 40/100.000, sedangkan di Kabupaten Pati rasio dokter masih sebesar 12,5/100.000. Hal tersebut menunjukkan jumlah dokter yang tersedia di Kabupaten Pati masih belum mencukupi.

### 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a) Pekerjaan Umum

Secara rinci capaian kinerja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.30**  
**Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum**  
**Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	angka	0,27	0,24	0,23	0,21	0,20
2	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	40	44	50	54,79	58
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	angka	0,068	0,068	0,066	0,067	0,117

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	5	5,2	5,2	5,5	5,5
5	Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	%	72,33	72,5	73,3	73,3	74,68
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	8	9	9	10	10
7	Persentase pembangunan turap/talud/ bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	60	63	65,7	67,2	69,4
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	12	12	12	12	14
9	Persentase wilayah bebas banjir	%	68	70	73	75	74
10	Rasio Jaringan Irigasi	angka	73,86	71,34	69	66,8	64,74
11	Persentase Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	70	70	57	78	79
12	Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	14.675	14.675	11.950	16.352	16.562
13	Air Minum Perkotaan (PDAM)	KK	22.521	23.306	24.539	27.385	27.559
	Air Minum (sumur dalam) (DPU)	KK	82.205	142.684	183.070	187.102	228.155
14	Sanitasi (Air Limbah Domestik)	%	57,35	60,97	62,1	62,36	71
15	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	40	42,58	43,04	54	58
16	Persentase kondisi infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik	%	42	45	51	60	65

Sumber: DPUPR, DISPERKIM Kabupaten Pati, 2017.

Capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum masih perlu ditingkatkan terutama komponen *universal access* (100-0-100), yaitu air bersih dan sanitasi supaya memenuhi 100%. Infrastruktur pendukung pertanian sangat mendesak ditingkatkan capaian kondisi baiknya, mengingat Kabupaten Pati mengandalkan sektor pertanian. Sarana publik seperti jalan, drainase, turap kondisi baik masih tercatat di bawah 80%. Infrastruktur sangat strategis untuk kabupaten Pati dengan potensi ekonomi industri dan pertanian, sebagai jalur koneksi antarwilayah produksi.

#### b) Penataan Ruang

Penataan ruang penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Capaian kinerja Urusan Penataan Ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.31**  
**Capaian Pembangunan Bidang Tata Ruang**  
**Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Tersedianya informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan digital.	%	50	70	80	90	100
2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100
3.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
4.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	21,9	19,37	24,53	36	35

Sumber: DPUPR dan BAPPEDA Kabupaten Pati, 2017

Secara umum kinerja urusan penataan ruang masih perlu ditingkatkan. Kelengkapan data kinerja pembangunan urusan penataan ruang perlu ditingkatkan kebaruan dan keakuratannya, karena menjadi dasar manajemen pembangunan dimensi spasial.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah penduduk yang semakin meningkat berdampak pada peningkatan jumlah kebutuhan perumahan. Pemerintah meningkatkan kualitas hunian melalui program peningkatan rumah tidak layak huni.

**Tabel II.32**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Kawasan Kumuh	%	NA	NA	NA	NA	0,935
2	Rumah tidak layak huni	unit	94.230	92.273	91.729	90.787	33.278
3	Rasio rumah layak huni	angka	NA	NA	NA	NA	0,75
4	Rasio permukiman layak huni (permukiman yang tertata)	%	NA	NA	NA	NA	0,99
5	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	NA	24,35	83,68	73,30	91,03

Sumber: Disperkim Kabupaten Pati, 2017.

Secara umum kinerja urusan perumahan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Kawasan kumuh sebagai salah satu target belum tertangani sebagaimana ditargetkan dalam program *universal access*. Rumah tak layak huni mengalami penurunan signifikan di tahun 2016, karena data awal menggunakan data PBDT sedangkan data 2016 menggunakan hasil survey update yang dilakukan oleh DPU Kabupaten Pati dan tidak masuk dalam PBDT. Selanjutnya hasil survey terakhir yang digunakan sebagai target untuk ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni selama lima tahun ke depan. Namun demikian, intervensi kebijakan pemerintah untuk kebutuhan perumahan layak huni perlu dilanjutkan.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat mencakup tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran K3, kriminalitas, dan wawasan kebangsaan untuk mendukung kondusivitas daerah.

**Tabel II.33**  
**Capaian Kinerja Urusan Kesbangpoldagri**  
**Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	%	80	79,85	88,68	91,25	82,09
2	Persentase Penegakan PERDA	%	84	76	89	96	90
3	Jumlah konflik	kasus	2	3	2	1	1
4	Jumlah penanganan bencana alam / sosial (peristiwa)	kasus	NA	217	333	63	105
5	Angka Kriminalitas	Angka	1,85	1,81	1,77	1,73	1,69
6	Cakupan patroli Satpol PP (Patroli Wilayah)	%	1	1,8	2,42	2,42	2,42
7	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	angka	1,12	1,1	1,08	1,07	1,06
8	Kegiatan pembinaan politik daerah	keg	33	36	61	65	71
9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0,00052	0,00052	0,00052	0,00055	0,00055
10	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	80	81	83	84	86

Sumber: Satpol PP, Kesbangpol dan BPBD Kabupaten Pati, 2017

Persentase penyelesaian pelanggaran K3 dan penegakan Perda di Tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian terutama di tahun-tahun pelaksanaan pemilu karena itu pemerintah daerah perlu melakukan pengamanan dan patroli dalam menjaga stabilitas politik di daerah. Berdasarkan ketersediaannya, rasio Polisi Pamong Praja sudah mencukupi. Namun demikian dari total Polisi PP, hanya satu yang telah memenuhi standar kompetensi. Selain itu perlu juga dilakukan upaya penanaman pola sikap, perilaku, akhlak dan budi pekerti melalui pendidikan karakter. Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih rendah. Hal ini disebabkan Fasilitas pelayanan bencana kebakaran masih terpusat di ibukota kabupaten.



6) Sosial

Urusan sosial mencakup Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan. Indikator kinerja urusan sosial sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel II.34**  
**Pencapaian Kinerja Bidang Sosial di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	722	584	1127	1153	1549
2	Jumlah PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	369	136	101	190	1049
3	Persentase PMKS yang ditangani	%	0,25	0,28	0,39	0,43	0,89
4	Persentase PMKS yang direhabilitasi	%	-	-	-	-	0,36
5	Persentase penyandang cacat dan trauma yang tertangani	%	-	-	-	-	1,82
6	Persentase panti asuhan dan panti jompo yang memenuhi standar	%	1	1	1	1	1
7	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	%	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
8	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	25	25	25	25	25
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	0	0	100	0	0
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap darurat lengkap	%	NA	NA	97	66	71
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	NA	NA	NA	NA	8,6

Sumber : Dinsos Kabupaten Pati, 2017

Secara umum kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan cakupan layanan namun belum optimal. Hal ini dikarenakan data akurat (data pilah) mengenai PMKS di Kabupaten Pati belum tersedia sehingga penanganan PMKS belum efektif.

**b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

1) Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja perlu ditangani lebih intensif dengan pendekatan kemitraan, berbasis komunitas, dan mendorong inovasi masyarakat. Kemitraan dengan kelompok asosiasi pengusaha dan profesional lain di Kabupaten Pati berpeluang mendapatkan kesempatan penyerapan tenaga kerja lebih besar.

**Tabel II.35**  
**Pencapaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan**  
**di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Sat	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	30,21	30,81	37,26	38,23	72,78
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	80	80	80	80	100
3	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0	75	75	75	100
4	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,878	0,927	0,936	0,956	0,956
5	Jumlah perselisihan hubungan industrial (pengusaha-pekerja) per tahun	kasus	12	14	4	8	6
7	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,94	71,2	68,91	67,83	68,0*
8	Tingkat pengangguran terbuka	%	12,2	7,3	6,37	4,43	4,12*
9	Keselamatan dan perlindungan	%	97	97	97	97	98
10	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	71,43	100	100	100
11	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	73	77	86	78	67,13

Sumber : *Disnaker Kabupaten Pati, 2017*

Pengangguran masih terdapat di Kabupaten Pati, menunjukkan perlunya upaya perluasan kesempatan kerja. Persentase pencari kerja yang ditempatkan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dengan peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan semakin efektifnya pelaksanaan pameran kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Namun demikian, angka tersebut masih harus ditingkatkan karena penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha menjadi pilar penyangga kesejahteraan masyarakat dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat. Persebaran tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Pati ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel II.36**  
**Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**  
**Tahun 2012-2016**

Lapangan Pekerjaan Utama	2012	2013	2014	2015	
				Jumlah	%
1	183.798	243.078	237.912	189.608	30,72
2	86.086	70.887	76.309	100.755	16,32
3	122.901	115.647	131.510	140.024	22,68
4	92.098	106.815	77.793	102.154	16,55
5	77.604	58.309	84.409	84.758	13,73
JUMLAH	562.487	594.736	607.933	617.299	100,00

Sumber :BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2016.

Catatan :1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan;  
2. Industri Pengolahan;  
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel;  
4. Jasa Kemasyarakatan;  
5. Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan)

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Pati cukup beragam, dengan dominasi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Namun sebenarnya, jumlah tenaga kerja pertanian mengalami penurunan paling tinggi dibandingkan lapangan pekerjaan utama yang lain. Hal tersebut, diduga karena tenaga kerja bidang pertanian didominasi oleh usia tua dan rendahnya minat pemuda untuk menggeluti usaha tersebut. Di sisi lain, lapangan kerja bidang industri pengolahan dan jasa kemasyarakatan justru meningkat. Selain disebabkan oleh meningkatnya investasi PMDN/PMA, juga disebabkan oleh tingginya minat penduduk Kabupaten Pati untuk menggeluti sektor tersebut.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan dan perlindungan anak berperan strategis mendukung pencapaian pembangunan berkeadilan dan pada gilirannya menuju masyarakat sejahtera. Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender menasar pada semua aspek kehidupan, untuk menguatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang kompetitif. Beberapa indikator pengukur pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel II.37**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**  
**Anak di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD	angka	97,86	95,01	95,62	95,20	91,52
2	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP	angka	81,00	77,76	83,56	83,56	77,67
3	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA	angka	55,85	59,90	59,56	59,56	64,29

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
4	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	%	47	47,97	48,14	92,84	93,80
5	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas (%)	%	98,23	98,7	99,98	96,25	98,60
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	%	90,95	88,56	90,97	87,07	88,65
7	persentase perempuan di level pengambil kebijakan di DPRD	%	32	32	32	32	32
8	Rasio KDRT	angka	0,15	0,14	0,15	0,04	0,01
9	persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	30	18	11	11	4
10	persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	51	26	12	30	26
11	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100
12	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
14	persentase lembaga perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender	%	7	7	7	7	7
15	Cakupan layanan re-integrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan PP & KB Kabupaten Pati, 2017.

Secara umum urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu ditingkatkan kinerjanya. Dalam sektor pendidikan, kesenjangan gender terdapat di tingkat pendidikan SMP dan SMA. Hal ini menunjukkan tingginya jumlah perempuan yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan dalam sektor ekonomi berdasarkan BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2015), kesenjangan pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan 68,78. Hal ini disebabkan kesenjangan gender dalam partisipasi kerja (74.00). Selain itu partisipasi lembaga perempuan dalam pengarusutamaan gender masih rendah, perlu adanya penguatan kelembagaan dengan harapan keberadaan lembaga tersebut dapat menjadi wadah dalam peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

### 3) Pangan

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3)

aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

**Tabel II.38**  
**Capaian Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Regulasi Ketahanan Pangan	perda	0	0	1	1	1
2	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kap	303.682	258.653	257.054	309.029	313.525
3	Ketersediaan Energi Per Kapita	Kkal/kap/hari	90	90	90	90	92
4	Ketersediaan Protein Per Kapita	gram/kap/hari	90	90	90	90	92
5	Skor PPH	angka	82,4	83,5	83,5	83	83
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	40	60	60	70	95
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	15	25	50	58	65

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, 2017.

Penanganan daerah rawan pangan membutuhkan kerjasama lintas sektoral dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Daerah rawan pangan di Kabupaten Pati diduga disebabkan oleh kemiskinan dan kerentanan bencana. Oleh karena itu strategi yang akan dipergunakan untuk penanganan daerah rawan pangan berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan dan bencana di daerah.

#### 4) Pertanahan

Pola penatagunaan tanah adalah informasi mengenai keadaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kawasan yang disiapkan oleh Kantor Pertanahan. Indikator kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.39**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah lahan bersertifikat	%	24,9	25,6	25,7	26,0	27,6
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	kasus	NIHIL				
3	Penyelesaian izin lokasi	Bidang	3	6	5	13	14

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, 2016

Secara umum kinerja pertanahan perlu ditingkatkan. Pembangunan dan penataan pertanahan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan menjadi lebih baik karena mempunyai peranan sosial dan ekonomi yang penting. Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang cukup sensitif dan tidak jarang menimbulkan konflik. Hal tersebut tidak terkecuali juga terjadi pada tanah-tanah yang dimiliki oleh negara.

5) Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Pati dapat dilihat dari kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.40**  
**Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Indeks Kualitas Air	angka	33,16	44,12	50,00	47,04	46,67
2	Indeks Kualitas Udara	angka	94,95	95,95	80,12	100,92	101,67
3	Indeks Tutupan Lahan	angka	23,46	36,56	36,56	36,56	36,56
4	Persentase penanganan sampah	%	10,71	10,76	10,83	10,83	12,20
5	Ketersediaan Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	angka	NA	NA	0,002	0,003	0,003
6	Jumlah kelompok pengelola sampah aktif	klp	43	44	46	46	47
7	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	0,54	0,61	0,56	0,65	NA
8	Kerusakan Kawasan Hutan	%	43,65	43,65	34,69	34,44	NA
9	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	angka	0,44	0,44	0,44	0,44	NA
10	Jumlah Perda Lingkungan Hidup	Perda	2	2	2	2	2
11	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100
12	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%	10	25	20	16	14
14	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	unit	3	3	5	7	8

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
15	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	unit	3	3	5	7	8
16	Luasan RTH sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56
17	Luas wilayah penghijauan di kawasan rawan longsor dan Sumber Mata Air	Ha	2	2	2	2	2
18	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	12	12	12	45	59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, 2017

Dari perkembangan 5 tahun terakhir, kinerja penanganan kualitas lingkungan hidup perlu ditingkatkan antara lain peningkatan indeks kualitas air yang dipengaruhi oleh buangan limbah industri maupun domestik. Jenis industri yang menyumbang pencemaran air di Kabupaten Pati yaitu, industri tahu tempe, industri tapioka dan industri kuningan *elektroplating*. Industri ini berskala kecil perumahan dan terletak berpencar-pencar, sehingga sulit untuk mengolah limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penanganan limbah terpadu. Selain itu, persentase penanganan sampah juga menunjukkan kinerja yang rendah, sampai saat ini cakupan layanan persampahan baru meliputi 6 kecamatan dan belum semua wilayah yang ada di 6 kecamatan tersebut terlayani. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kemampuan masyarakat dalam pengurangan volume sampah. Sedangkan terkait dengan luasan ruang terbuka hijau (RTH) masih rendah belum mencapai 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sementara itu sesuai analisis KLHS, terdapat alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun sebesar 4.678,64 ha yang diperkirakan menghasilkan emisi karbon sebanyak 420.107,12 ton CO<sub>2</sub>e. Meningkatnya emisi karbon akan meningkatkan kerawanan bencana iklim yang berdampak pada anomali cuaca.

Data indeks kualitas udara di Kabupaten Pati pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan angka lebih besar dari 100, hal ini diduga disebabkan oleh metode pengambilan sampel udara ambient menggunakan metode *infinger* dengan durasi waktu pengukuran ± 2 jam. Hal ini akan menyebabkan perbedaan data indeks kualitas udara apabila metode pengambilan sampel udara ambient menggunakan metode *pasive sampler* dengan durasi waktu pengukuran ± 24 jam, sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati pada tahun 2017.

#### 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.41**  
**Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**  
**Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio penduduk ber KTP	%	50	55	60	65	70
3	Rasio bayi ber-akte kelahiran (%)	%	93	96	94	90	86,16
4	Kepemilikan akta kelahiran (%)	%	53	55	68	60	59
6	Ketersediaan database kependudukan	Ada/tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ blm	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, 2017

Kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil perlu ditingkatkan kinerjanya terkait dengan ketersediaan data dan cakupan layanan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih di bawah 100%. Hal tersebut kemungkinan disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan ketertiban kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Oleh karena itu, Kabupaten Pati perlu meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil agar lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Gambaran capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pati periode 2012-2016 dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II.42**  
**Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat**  
**Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah PKK aktif	PKK	406	406	406	406	406
2	jumlah kelompok binaan PKK	PKK	42	42	42	42	42
3	Posyandu aktif	unit	1601	1602	1604	1604	1604
4	LPM Berprestasi	unit	4	4	5	6	5
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	unit	17	59	47	33	157
6	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	8%	15%	30%	38%	45%



No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	2	2	2	3	3
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Desa	305	305	305	305	305
9	Jumlah sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Unit	34	39	45	82	113

Sumber : Dispermades Kabupaten Pati, 2017

Pada tahun 2015, Kemendesa dan BPS mengeluarkan Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks. IDM Kabupaten Pati di tahun 2015 adalah 0,6036 yang artinya Rata-rata desa di Kabupaten Pati berada pada kategori berkembang. Selanjutnya IDM Kabupaten Pati berada di bawah IDM Jawa Tengah (0,629). Lebih lanjut masih terdapat 4 desa sangat tertinggal (0,99%) dan 209 desa tertinggal (52,12%). Persentase tersebut juga lebih tinggi dibandingkan persentase desa sangat tertinggal dan tertinggal Jawa Tengah sebesar 33,1%. Hal tersebut mengindikasikan pembangunan desa masih belum optimal. Berdasarkan tiga kategori IDM, kontribusi terendah berada pada Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,519.

Pembangunan desa yang belum optimal dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti partisipasi masyarakat yang masih rendah (sekitar 3%). Walaupun nilai tersebut kemungkinan belum mencerminkan seluruh kontribusi riil swadaya desa, namun dapat menjadi indikasi luntarnya budaya gotong royong dalam masyarakat. Dalam bidang ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan persentase LKM aktif yang masih di bawah 50%. Kemungkinan akar masalah yang lain adalah kapasitas pemerintahan desa sebagai ujung tombak peningkatan kinerja pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kecakapan dalam perencanaan pembangunan dan pengadministrasian data perlu ditingkatkan

#### 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana menangani urusan sinkronisasi kebijakan untuk menjaga pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan ketahanan keluarga sejahtera, Indikator kinerja urusan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II.43**  
**Pencapaian Kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Sat	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Laju Pertumbuhan Penduduk dari Kelahiran	%	0,37	0,39	0,4	0,4	0,12
2	Rata-rata jumlah anak per keluarga		0,94	0,95	0,94	0,9	0,9
3	Prevalensi KB	angka	0,7828	0,755	0,7795	0,739	0,8233
4	Rasio akseptor KB)	%	77,96	78,28	77,99	74,29	82,33

No	Indikator	Sat	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	77,96	78,28	77,99	74,29	82,33
6	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif	%	78,27	75,50	77,95	74,38	82,32
7	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	%	11,21	10,92	10,96	11,32	11,00
8	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	0	0,2	0,2	0,2	0,2
9	Persentase Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	2,98	2,76	2,75	2,5	2,9
10	Persentase kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	%	48	44	38	33,47	30
11	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	84	83	81	82	83,19
12	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB)	%	85	84	86	88	84,54
13	Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100
14	Jumlah PIK remaja yang aktif	orang	33	33	33	33	33
15	Jumlah BKB yang aktif	klp	321	340	459	359	359
16	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pati, 2017

Kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang perlu untuk ditingkatkan antara lain peningkatan pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif. Data menunjukkan bahwa persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif masih fluktuatif walaupun di tahun 2016 cukup baik berada pada angka 82,32 namun perlu lebih ditingkatkan di periode selanjutnya. Dengan semakin meningkatnya pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif diharapkan cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) di Kabupaten Pati mencapai target nasional.

#### 9) Perhubungan

Untuk kinerja pelaksanaan pengembangan urusan perhubungan di Kabupaten Pati selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.44**  
**Capaian Pembangunan Perhubungan Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Terminal Bis Tipe C	Unit	2	2	2	3	3
2	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	87	86	87	88	88
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	Kali	13.957	15.636	17.310	18.654	20.326
4	Kepemilikan KIR angkutan umum (KBWU)	unit	16.343	17.458	18.583	19.597	20.417
5	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	20	20	20	20	20
6	Jumlah angkutan kota	Unit	176	176	176	176	176
7	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten	unit	271	271	271	271	271
8	Jumlah orang melalui terminal per tahun	org	3.286.114	3.254.517	3.222.920	3.191.322	3.159.725
9	Jumlah izin trayek	Unit	118	79	68	101	84
10	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	100	100	100	100	100
11	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	rasio	0,63	0,65	0,67	0,68	0,69
12	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guard rill) pada jalan Kabupaten						
	a. Rambu LL tidak bersinyal	Unit	1.696	1.869	2.124	2.278	2.466
	b. Rambu LL bersinyal	Unit	78	96	111	114	121
	c. Marka jalan	m <sup>2</sup>	500	2.192	1.889	7.597,39	2.662,74
	d. Guardrail	M	100	180	240	240	240

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Pati, 2016.

Kinerja urusan perhubungan masih perlu ditingkatkan diantaranya rasio ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dimana pada tahun 2016 masih berada pada angka 0,69. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan instansi yang menangani urusan pembangunan infrastruktur perhubungan Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas pelayanan ruas jalan.

#### 10) Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelaksanaan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa di Kabupaten Pati selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel II.45**  
**Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah OPD yang Sudah Menerapkan E GOV/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	unit	1	1	1	1	2
2	Jumlah aplikasi <i>e-Gov</i> yang dimiliki oleh PD	unit	1	3	3	3	3
3	Website milik pemerintah daerah	web	25	30	34	37	37
4	Persentase PD Telah Memiliki Website	%	20	30	40	50	60
5	Jumlah <i>WiFi</i> Publik yang disediakan pemerintah.	spot	0	0	2	2	3
6	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah	29	29	29	29	29
7	Jumlah penyiaran radio/TV	siaran	25	25	30	35	35
8	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100
9	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	40	50	60	65	70
10	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	20	40	60	65	75
11	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	20	30	35	40	60

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pati, 2017

Dalam rangka meningkatkan sarana integrasi dan interaksi sosial bagi masyarakat dan dalam rangka mewujudkan *smart city* Kabupaten Pati, dari data OPD yang sudah menerapkan E GOV/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi pada tahun 2016 sebanyak 2 perangkat daerah, masih ada 49 perangkat daerah yang belum. Untuk itu kepada perangkat daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika perlu melakukan pendampingan teknis kepada perangkat daerah dalam pengembangan teknologi informasi (aplikasi/website).

#### 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Berdasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan yang diserahkan kepada kabupaten adalah manajemen koperasi dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Kinerja urusan koperasi dan UKM ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.46**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Koperasi Aktif	%	39,69	70,21	75,05	74,64	51,06
2	Persentase Koperasi Sehat Simpan Pinjam	%	0	15,53	0	2,67	2,67
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	55,59	54,14	53,31	59,30	69,92

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, 2017.*

Kinerja urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Pati masih sangat perlu ditingkatkan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketersediaan data yang akurat dan valid tentang jumlah dan perkembangan Koperasi, Usaha mikro dan kecil sebagai basis data perencanaan. Selain itu, kinerja yang masih perlu ditingkatkan adalah pengembangan kapasitas usaha mikro sehingga meningkat menjadi usaha kecil.

Berkaitan dengan kinerja urusan koperasi, perkembangan koperasi aktif dan koperasi sehat menunjukkan penurunan. Kondisi tersebut sebenarnya merupakan puncak dari masalah yang terjadi sejak tahun 2013, dimana beberapa koperasi menunjukkan indikasi tidak aktif, namun, pemerintah baru berwenang mengeluarkan keputusan pernyataan tidak aktif setelah 3 tahun.

#### 12) Penanaman Modal Daerah

Capaian indikator penanaman modal di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.47**  
**Capaian Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertumbuhan nilai investasi berskala nasional	%	26,56	72,88	51	1,33	4,6
	PMA	US\$ Ribu	0	21.899,9	9.242,9	1.800	0
	PMDN	Rp. (juta)	1.000	9.273,460	342.168,9	4.842,501	4.906.905,3
2	Jumlah investor berskala nasional						
	PMA	Investor	0	5	3	2	0
	PMDN	Investor	1	48	25	17	17
3	Rasio daya serap tenaga kerja	orang/ perusahaan	5	462	1.572	9.207	2.896

*Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, 2016*

Kinerja penanaman modal menunjukkan indikasi penurunan sejak tahun 2014 yang ditunjukkan oleh penurunan jumlah investor, baik PMA dan PMDN. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena pemrosesan izin yang belum efektif dan kesesuaian antara lahan yang diinginkan investor dengan rencana peruntukan lahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan promosi dan pembaruan data potensi investasi untuk

menarik investor dan tingkat investasi tanpa mengorbankan kelangsungan kehidupan lokal. Pelayanan perizinan perlu ditingkatkan supaya tidak menghambat kelancaran usaha. Namun demikian, pertimbangan lingkungan perlu diperhatikan dalam pemberian izin untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

### 13)Kepemudaan dan Olahraga

Pelayanan kepemudaan ditujukan untuk menumbuhkan budaya prestasi diantara para pemuda, termasuk di dalamnya prestasi dalam bidang olahraga. Fasilitasi keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati adalah fasilitasi pembentukan organisasi olahraga, pembangunan gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dan gedung olahraga serta Lapangan olahraga. Pemerintah juga melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga dalam rangka menjaring SDM keolahragaan yang baik dan berprestasi. Indikator urusan Kepemudaan dan Olah Raga dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel II.48**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100
2	Persentase wirausaha muda	%	0,152	0,155	0,154	0,156	0,157
3	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	26	26	26	28	33
4	Jumlah Pelatih yang bersertifikat	Orang	80	120	160	160	160
5	Jumlah atlet muda yang dibina	Atlet	1.224	1.226	1.206	1.278	1.298
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	66	114	74	78	82

Sumber: Dinporapar Kab. Pati 2017

Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga yang perlu ditingkatkan khususnya minat pemuda untuk berwirausaha, dimana data menunjukkan persentase di bawah 1 %. Saat ini, penduduk usia 15-30 tahun mencapai 32,25% dari total penduduk usia produktif, dengan dominasi tertinggi berada pada rentang usia 15-19 tahun. Oleh karenanya peran pemuda dalam pembangunan khususnya

### 14)Statistik

Urusan statistik yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten. Indikator urusan statistik dipaparkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel II.49**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik**  
**Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Data Base	1	1	1	1	1
2	Persentase keterisian data SIPD	%	35	35	38	40	40

*Sumber: Bappeda Kabupaten Pati*

Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi sudah ada, namun kelengkapan data sektoral masih kurang, sebagaimana ditunjukkan dari kebutuhan data kinerja masih belum seluruhnya dapat terpenuhi. Data statistik makro untuk level kecamatan juga belum tersedia. Hal yang perlu diinisiasi dan ditingkatkan adalah penyediaan data statistik sektoral Kabupaten Pati hingga tingkat kecamatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM berkaitan dengan analisis dan manajemen data dan informasi perlu dilakukan.

15) Persandian

Urusan persandian yang menjadi kewenangan kabupaten adalah (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten, dan (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-perangkat daerah kabupaten Indikator urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.50**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian**  
**di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	%	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pati 2017*

Capaian kinerja persandian perlu ditingkatkan untuk pengamanan kerahasiaan informasi pemerintahan sehingga mendukung kondusivitas ketenangan masyarakat.

16) Kebudayaan

Upaya memelihara dan mengembangkan kesenian/tradisi lokal merupakan kontribusi besar dalam pembangunan budaya nasional. Hal ini sekaligus merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masuk dan berkembangnya budaya asing yang sering bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Pati bisa dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel II.51**  
**Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	BCB (Benda Cagar Budaya)	20	21	14	22	34
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	5	5	5	5	5
3	Jumlah grup kesenian	Unit	91	97	108	183	183
4	Cakupan Kajian Seni	%	20	20	53	53	53
5	Cakupan Fasilitasi Seni	%	86	86	100	100	100
6	Cakupan Organisasi seni	%	67	67	67	67	67
7	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	33	33	33	33	33

Sumber : Disbudparpora 2016, Disdikbud 2017.

Kinerja urusan kebudayaan yang perlu ditingkatkan adalah pelestarian nilai budaya dan seni lokal. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan kekayaan budaya secara profesional. Selain itu juga perlu dilakukan pemasyarakatan nilai budaya dan seni lokal perlu dilakukan untuk membendung pengaruh budaya asing, khususnya melalui kebijakan penerapan nilai budaya lokal di semua lini masyarakat dan pengenalan nilai budaya dan seni lokal melalui institusi pendidikan.

#### 17) Perpustakaan

Capaian kinerja pembangunan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.52**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah perpustakaan	Unit	1.126	1.130	1.137	1.204	1.137
2	Persentase perpustakaan yang sudah dibina	%	0,89	1,77	1,78	2,29	2,64
3	Jumlah kunjungan perpustakaan dalam satu tahun	Orang	23.749	17.366	20.593	30.025	32.030
4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksp	35.983	38.982	43.890	47.687	49.312
5	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	15.301	16.754	18.577	19.796	20.526
6	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Angka	0,029	0,032	0,036	0,039	0,040
7	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan	Orang	1.979	1.447	1.716	2.502	2.669
8	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	2	2	2	2	2

Sumber: Kantor Arpusda Kab. Pati, 2016



Kinerja urusan perpustakaan yang perlu ditingkatkan adalah perbaikan kualitas dan variasi layanan perpustakaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan modernisasi perpustakaan dan peningkatan jumlah dan kapasitas pustakawan. Selain itu, untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pembinaan perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Pati perlu ditingkatkan.

18) Kearsipan

Capaian kinerja pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.53**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Pengelolaan arsip pola baru	%	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
2	pertumbuhan dokumen/arsip daerah yang telah diduplikasi dalam bentuk informatika	%	0	0	0	0	0
3	Pertumbuhan jumlah pengguna dokumen/arsip daerah	%	3	3	4	5	6
4	SDM pengelola kearsipan	Orang	3	3	3	3	3

Sumber : Kantor Arpusda Kab. Pati, 2016

Kinerja urusan kearsipan perlu ditingkatkan adalah duplikasi arsip digital, pengintegrasian sistem jaringan arsip daerah yang memudahkan pengguna, dan pengelolaan arsip pola baru oleh OPD. Oleh profesionalitas sumber daya pengelola arsip dan sarana prasarana pengelolaan arsip perlu ditingkatkan.

**c. Urusan Pemerintahan Pilihan**

1) Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Pati mempunyai potensi pengembangan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.54**  
**Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Kunjungan wisata	Orang	820.653	1.147.318	1.009.706	1.228.463	1.381.418
2	PAD sektor pariwisata	Rupiah (ribu)	26.251,5	37.291	46.029,5	51.794	104.345
3	Jumlah objek wisata	Objek	12	16	20	20	20
4	Rata-rata okupansi hotel berbintang	&	NA	47,27	31,18	30,98	33,51
5	Rata-rata okupansi hotel tidak	%	NA	28,20	28,87	23,98	24,14

	berbintang						
6	Jumlah kerjasama antardaerah di kawasan PAKUDJEMBARA	Dok	0	1	0	0	0

Sumber: Disporapar Kabupaten Pati, 2017.

Kinerja pariwisata cukup baik yang dibuktikan dengan tren peningkatan jumlah wisatawan. Peningkatan tersebut ditunjang oleh kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong sekolah memperkenalkan objek wisata di Kabupaten Pati. Untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Pati khususnya di bidang pariwisata diperlukan upaya peningkatan dan pengembangan destinasi wisata potensial. Selanjutnya langkah yang harus dilakukan adalah mengenalkan wisata Pati ke daerah lain. Selama ini, kerjasama dengan pihak lain untuk promosi wisata sudah dilakukan, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan.

## 2) Pertanian

Pencapaian kinerja urusan Pertanian di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.55**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat pendapatan petani per tahun	Rp (000)	21.332	20.316	19.865	24.831	22.574,3
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	angka	103,64	105,25	100,63	101,6	102,76
3	Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/ perkebunan	%	21	23	24	24	26
4	Produksi padi	ton	575.905	584.270	497.081	646.068	666.380
5	Produksi jagung	ton	119.123	96.028	126.410	138.075	168.374
6	Produksi kedelai	ton	2.764	3.988	3.058	4.172	6.205
7	Produksi ubi kayu	ton	732.961	698.325	744.746	661.975	699.101
8	Produktivitas padi	kw/ha	57,89	56,18	53,70	59,01	58,25
9	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	23,60	23,23	21,89	22,69	22,36
10	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	12,72	12,32	10,85	11,56	11,39
11	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	1,34	1,28	1,31	1,18	1,16
12	Angka prevalensi penyakit hewan	angka	0	0	0	0	0
13	Angka prevalensi penyakit zoonosis	angka	0	0	0	0	0
14	Produksi Daging	kg	4.496.596	4.518.052	5.255.181	5.316.322	6.319.743
15	Produksi Telur	kg	3.141.664	3.219.254	3.086.156	3.074.591	3.287.475
16	Produksi Susu	liter	276.539	245.450	288.925	188.826	173.996

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 2017.

Terjadi penurunan kinerja di sektor pertanian yang diindikasikan dengan penurunan NTP. Hal tersebut diduga disebabkan oleh produktivitas produk unggulan pertanian yang fluktuatif, kualitas sumber daya manusia pertanian yang didominasi usia tua, penerapan

teknologi pertanian yang masih rendah serta pemasaran yang masih terbatas.

### 3) Perdagangan

Urusan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten yaitu: (1) pasar rakyat, (2) izin perdagangan lokal, (3) membangun dan mengelola sarana perdagangan, (4) menjaga pengendalian keamanan penyediaan barang kebutuhan pokok dan terkendalinya harga pasar, (5) penjaminan legalitas alat ukur perdagangan, (6) branding dan perluasan pemasaran produk ke luar daerah. Indikator urusan perdagangan di Kabupaten Pati dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel II.56**  
**Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pati**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	PDRB Sub Sektor Perdagangan menurut ADHB	Miliar (Rp)	3.294,91	3.414,41	3.695,91	4.009,97	4.377,59
2	Total PDRB menurut ADHB	Miliar (Rp)	21.048,73	23.360,04	25.931,45	28.417,09	31.644,42
3	Sumbangan PDRB Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB menurut ADHB	%	0,157	0,146	0,143	0,141	0,138
4	PDRB Sub Sektor Perdagangan menurut ADHK	Miliar (Rp)	3.119,40	3.178,82	3.287,46	3.500,93	3.658,74
5	Total PDRB menurut ADHK	Miliar (Rp)	19.893,32	21.072,32	22.314,76	23.363,63	24.760,35
6	Sumbangan PDRB Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB menurut ADHK	%	0,157	0,151	0,147	0,150	0,148
7	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Org	0	30	100	110	230
8	Jumlah Pasar Tradisional	Unit	21	21	21	21	21
9	Jumlah Pasar Modern	unit	35	42	50	57	124
10	Ekspor Bersih Perdagangan	Miliar (Rp)	140,66	148,07	178,36	226,13	307,82

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2017.

Selama 5 tahun, Kabupaten Pati mengalami peningkatan jumlah pasar modern. Hal tersebut berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan manajemen pasar tradisional perlu dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Selain itu, *branding* produk Pati perlu dilakukan supaya dapat bersaing di dunia internasional, sehingga dapat meningkatkan PDRB dan pendapatan per kapita masyarakat.

4) Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian ditujukan Dalam rangka meningkatkan keberadaan produk dari sektor industri mikro dan kecil (sesuai kewenangan kabupaten/kota) agar diterima oleh masyarakat. Gambaran terkait capaian kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.57**  
**Capaian kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Sat	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri PDRB Usaha	%	26,47	27,11	27,8	27,61	38,71
2	Cakupan pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan SDM dan pemasaran	Orang	809	1.403	937	1.171	1.288
3	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan lapangan usaha industri	persen	9,08	8,93	9,12	9,42	9,65
4	Pertumbuhan industri kreatif	persen	0,7	0,7	0,72	0,68	0,65
5	Pertumbuhan Industri	persen	4,2	4,5	4,5	4,5	6,2

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati, 2016.

Pemerintah Kabupaten Pati perlu meningkatkan kinerja urusan industri dengan memastikan akurasi dan validasi data pelaku usaha industri mikro-kecil dengan spesifikasi produknya, sehingga bisa terukur fokus evaluasi kemajuan produknya dan kontribusinya pada perekonomian Kabupaten Pati. Secara lebih spesifik, jenis industri yang potensial untuk meningkatkan daya saing adalah industri berbahan baku lokal, dan industri kreatif, namun pertumbuhannya belum optimal. Oleh karena itu, pembinaan industri yang potensial perlu lebih ditingkatkan khususnya dalam hal perluasan pemasaran.

5) Urusan Transmigrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan urusan transmigrasi bagi kabupaten diperuntukkan bagi daerah penerima transmigran. Kabupaten Pati bukan daerah penerima transmigran. Indikator untuk urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.58**  
**Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah transmigran asal Pati	KK	30	10	4	5	5

Sumber: Dinsosnakertrans, 2016.

6) Kelautan dan Perikanan

Urusan perikanan merupakan salah satu urusan unggulan di Kabupaten Pati. Di sisi lain, urusan perikanan memberikan tantangan yang besar terkait kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil ikan. Keterbatasan teknologi, persaingan pasar dan dominasi pemilik modal, serta kebijakan pemerintah dalam hal kelautan merupakan tantangan yang tidak mudah. Perkembangan kinerja urusan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.59**  
**Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2012-2016**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	produktivitas perikanan tangkap	ton/kapal/tahun	24,84	16,58	7,9	13,07	13,03
2	Produksi perikanan	Ton	77.913	67.641	52.772	66.028	69.819
3	Produktivitas perikanan budidaya	ton/ha/tahun	2,64	3,17	2,64	3,61	3,87
4	produksi perikanan budidaya	ton	27.995,06	34.060,49	28.597,27	39.195,00	42.036,00
5	Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/kapita/tahun	22,74	23,53	24,36	28,95	25,94
6	Produktivitas garam	Ton/ha/musim prod	94,48	42,59	100,85	133,62	5,94
7	Produksi garam	Ton	269,802	121,610	287,977	381,704	16,869
8	Saluran tambak (primer)	km	NA	NA	NA	NA	103,6
9	Saluran tambak (sekunder)	km	NA	NA	NA	NA	206,98
10	Saluran tambak (tersier)	km	NA	NA	NA	NA	14,1
11	Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	Persen	0	3,79	7,50	-2,36	8,78
12	Volume ikan yang dilelang di TPI	Ton	42.818,99	28.953,72	16.143,04	26.710,12	27.782
13	Produksi olahan ikan	Ton	39.005,01	35.081,71	25.529,06	35.343,03	41.465,55
14	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2017.

Berdasarkan capaian kinerja bidang perikanan terlihat bahwa produktivitas perikanan budidaya dan garam masih di bawah produktivitas perikanan tangkap. Faktor lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas bidang perikanan sebagaimana terjadi di tahun 2016. Produksi garam mengalami penurunan drastis dikarenakan curah hujan yang tinggi dan pendangkalan saluran tambak sebesar 40-80%. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelompok petani perlu ditingkatkan supaya beradaptasi dengan tantangan lingkungan, serta perlu adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung peningkatan produksi garam.

Selanjutnya, berkaitan dengan perikanan tangkap, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan ekosistem laut untuk menunjang keberlangsungan produktivitas perikanan tangkap. Oleh

karena itu, nelayan perlu didorong untuk menggunakan peralatan tangkap ramah lingkungan. Berdasarkan Buku Indikator Utama Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, Pati memiliki keunggulan dalam produksi perikanan tambak. Hal tersebut menjadi peluang pengembangan usaha pengolahan perikanan berkaitan dengan ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pati perlu mendorong dan atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan hingga berdampak pada peningkatan daya saing dan nilai tukar nelayan.

#### d. Urusan Penunjang

##### 1) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memerlukan kelengkapan dan akurasi data yang tepat dan objektif. Fungsi strategis perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui keterpaduan dokumen perencanaan antara dokumen perencanaan yang ada baik sektoral maupun perencanaan tingkatan pemerintahan di atasnya. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati telah diupayakan sejalan dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan komitmen Kabupaten Pati menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional. Kinerja urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2012-2016 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel II.60**  
**Kinerja Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 - 2016**

No	Indikator	sat	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Tersedianya Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan (Perbup)	ada/tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	NA	NA	86,32	69,95	82,69
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	NA	NA	86.32	66.98	82.69
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	NA	NA	100	80.79	87.13

*Sumber : Bappeda Kabupaten Pati, 2017.*

Ketersediaan data yang aktual dan valid merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pati. Oleh karena itu, kinerja bidang perencanaan yang perlu ditingkatkan adalah perencanaan berbasis data. Selain itu, untuk penerapan aplikasi terintegrasi perlu diterapkan untuk menunjang efektifitas perencanaan dan evaluasi pembangunan.

##### 2) Urusan Penunjang Keuangan

Peraturan daerah dan kebijakan diformulasikan untuk meningkatkan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Indikator kinerja urusan penunjang keuangan disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel II.61**  
**Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Pati Tahun 2012 - 2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
<b>A Aspek Pendapatan</b>							
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	%	11	10	14	14	13
2	Bagi Hasil daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah	%	5	4	2	2	2
<b>B Aspek Belanja</b>							
3	Belanja Langsung terhadap Total Belanja	%	33	35	37	34	29
<b>C Aspek Pembiayaan</b>							
4	Rasio Defisit (Realisasi) terhadap Pendapatan (Realisasi)	%	4	3	4	2	4
5	Rasio Defisit (Realisasi) terhadap SILPA	%	25	21	24	13	20
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
7	Persentase SILPA terhadap APBD	%	12	13	15	14	7
8	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	49	45	44	40	33
9	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	12	12	15	15	16
10	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	% : %	33:67	35:65	37:63	34:66	34:66
11	Bagi hasil Kabupaten dan desa	Ribu rupiah	4.206.184	3.721.166	4.700.117	8.055.097	9.602.906
12	Penetapan APBD	Tepat waktu (Bln Des)	Tidak tepat waktu(28-03-2012)	Tidak tepat waktu(04-02-2013)	tepat waktu(12-2013)	tepat waktu(12-2014)	tepat waktu(12-2015)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Pati, 2016

Kinerja penunjang keuangan yang masih harus ditingkatkan adalah peningkatan penerimaan pajak daerah melalui optimalisasi objek dan nilai pajak. Selain itu, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap penerimaan PAD adalah pengoptimalan pemanfaatan aset daerah, melalui pembaruan data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Oleh karena itu, pembaruan data berkaitan dengan objek pajak dan aset daerah perlu dilakukan untuk menunjang peningkatan PAD.

### 3) Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan ini melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan. Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pati tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel II.62**  
**Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Pati**  
**Tahun 2016**

Berdasarkan Golongan				Berdasarkan Jabatan					Jenis Kelamin	
I	II	III	IV	Struktural			JFT	JFU	L	P
				Eselon II	Eselon III	Eselon IV				
162	2.084	5.469	4.680	27	166	633	8.526	3.044	6.259	6.139

Sumber: BKD Kabupaten Pati, 2016

Indikator kinerja Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang digunakan dijabarkan tabel berikut:

**Tabel II.63**  
**Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**  
**Kabupaten Pati Tahun 2012 - 2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Ratio PNS terhadap penduduk	rasio	0,91	0,92	0,93	0,93	0,92
2	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional (orang)	Org	38	40	37	41	35
3	Persentase PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan	%	10	6	10	10	10
4	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	hari	7	7	8	8	10
5	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	JPT	21	26	28	28	27
6	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	JA	4.105	4.115	3.855	4.102	3.828
7	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	JFT	8.815	8.560	8.381	8.707	8.500

Sumber: BKD Kabupaten Pati, 2016

Permasalahan yang masih harus ditingkatkan dari bidang penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan antara lain persentase PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan. Selain itu juga perlu diadakannya pembaruan basis data ASN sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengembangan sumber daya aparatur di daerah. Dalam rangka efektifitas pelayanan administrasi kepegawaian untuk mendukung tata kelola pemerintahan, perlu adanya upaya peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi.

#### 4) Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang penelitian dan pengembangan untuk mendorong pengembangan inovasi daerah. Indikator kinerja urusan penunjang penelitian dan



pengembangan, Persentase penelitian yang diimplementasikan, pada tahun 2016 baru sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan daerah yang berdasarkan hasil penelitian masih rendah. Hal tersebut disebabkan penelitian yang dilakukan belum didasarkan pada permasalahan dan isu-isu yang ada di daerah.

Permasalahan berkaitan dengan pengembangan adalah pemanfaatan inovasi yang masih rendah. Inovasi dalam hal ini merujuk kepada inovasi di masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan peningkatan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

#### 5) Urusan Penunjang Pengawasan

Fungsi pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat agar kinerja pembangunan daerah dan pelayanan publik lebih berdaya guna dan berhasil guna. Fokus pengawasan secara berkala pada semua objek pemeriksaan (obrik) OPD Kabupaten Pati. Capaian kinerja pengawasan selama tahun 2011-2016 dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler pada objek pemeriksaan di Kabupaten Pati dikemukakan tabel berikut:

**Tabel II.64**  
**Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan**  
**Kabupaten Pati Tahun 2012 - 2016**

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
2	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti (%)	%	93,5	97,7	96,7	93,6	83,3
3	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (laporan)	Dok	144	144	144	192	192
4	Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	Dok	701	827	728	979	437
5	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja (%)	%	54,8	50,0	57,7	71,4	64,3
6	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	100	100	100	100	100
7	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	%	100	99,7	99,6	91,3	92,5

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pati, 2016

Pemerintah Kabupaten Pati masih perlu mempertahankan kinerja untuk opini BPK supaya WTP dan meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Penjelasan indikator variabel aspek daya saing daerah sebagai berikut:

### a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing Kabupaten Pati utamanya kemampuan ekonomi berkaitan dengan posisi strategis yang berada di jalur Pantura. Selain itu Kabupaten Pati juga memiliki garis pantai sepanjang ±60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Namun demikian, kerentanan terhadap bencana, terutama banjir, tanah longsor, dan kekeringan dapat menurunkan daya saing daerah.

Pengembangan wilayah Kabupaten Pati juga diarahkan untuk pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan, industri, permukiman, dan pariwisata. Berkaitan dengan pengembangan wilayah, untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Pati diantaranya melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD). Berdasarkan data kontribusi PDRB sektoral, sektor industri manufaktur dan sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam komposisi PDRB Kabupaten Pati yang di dalamnya terdapat beberapa jenis produk unggulan daerah.

Indikator kemampuan ekonomi daerah sebagaimana ditunjukkan di atas adalah dari aspek produksi. Aspek yang lain adalah pengeluaran rata-rata penduduk. Pengeluaran rata-rata perkapita pertahun adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan jumlah penduduk. Perkembangan pengeluaran perkapita Kabupaten Pati tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.65**  
**Tabel Perbandingan Indeks Gini, Konsumsi Nonmakanan, LPE dan Pengeluaran Perkapita Riil Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Gini Rasio	Pengeluaran Perkapita Riil (Rp. 000)	Konsumsi Non Makanan (%)	Konsumsi Makanan (%)
2012	5,93	0,29	8.997.000	47.16	52.84
2013	5,97	0,30	9.088.000	46.22	53.78
2014	4,64	0,31	9.106.000	48.59	51.41
2015	5,94	0,35	9.380.000	54.43	45.57
2016	5,20	n.a	9.548.000	48.04	51.96

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2017

Kemampuan ekonomi daerah dapat direpresentasikan melalui rerata pertumbuhan produktivitas total daerah yang tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat pemerataan pendapatan direpresentasikan melalui indeks gini. Semakin tinggi indeks gini berarti semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan masyarakat masih menyisakan permasalahan berupa distribusi pendapatan yang belum merata.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari persentase pengeluaran nonmakanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat,

maka pola konsumsi masyarakat akan bergeser ke konsumsi nonmakanan. Berdasarkan teori kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi nonpangannya  $\geq 50\%$ , menunjukkan kondisi rumah tangga yang baik sedangkan apabila tingkat konsumsi nonpangannya menunjukkan nilai 20-49% menunjukkan kondisi sedang dan  $\leq 19\%$  menunjukkan kondisi yang buruk.

Pengeluaran perkapita riil masyarakat Kabupaten Pati sejak tahun 2012-2016 menunjukkan tren yang meningkat. Proporsi konsumsi nonpangan menunjukkan nilai 20-49% sehingga apabila didasarkan dari teori di atas, dapat digolongkan ke dalam kondisi rumah tangga yang sedang. Hal tersebut mengindikasikan kesiapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan produktif. Selanjutnya diperlukan inisiatif pemerintah untuk mendorong munculnya usaha produktif.

#### **b. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur**

Posisi Kota Pati, Juwana dan Tayu dalam perencanaan pengembangan wilayah (struktur ruang) Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Pati meliputi rencana sistem perkotaan (Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pengembangan Kawasan, dan Pusat Kegiatan Lingkungan) dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Pati meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya.

Ketersediaan sarana prasarana wilayah yang didukung dengan infrastruktur yang memadai baik kualitas dan kuantitasnya serta persebarannya yang merata akan menumbuhkan daya tarik dan daya saing daerah menguatkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif Kabupaten Pati.

##### 1) Fasilitas Perhubungan

Kabupaten Pati memiliki kondisi jalan berkualitas baik sebesar 58%, panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 74,68% untuk konektivitas antarwilayah. Sarana perhubungan di Kabupaten Pati belum memadai. Tersedia 271 buah angkutan umum yang melayani sepanjang jaringan jalan kabupaten. Kabupaten Pati memiliki terminal bis tipe C sebanyak 3 buah. Data tahun 2016 sebanyak 3.159.725 orang melewati terminal Pati.

##### 2) Fasilitas Penunjang

Salah satu unsur penunjang pembangunan adalah adanya jasa peristirahatan dan hiburan. Fasilitas hotel berperan sebagai variabel yang menunjang perkembangan perekonomian di Kabupaten Pati. Hotel ini akan memfasilitasi pengunjung dari luar kota yang akan melakukan kegiatan bisnis, wisata, dan lain-lain. Tahun 2016 di Kabupaten Pati telah tersedia hotel berbintang, *homestay*, dan restoran yang menyediakan beragam kuliner. Selain itu, Kabupaten Pati juga ditunjang dengan tersedianya objek wisata alam, religi, dan buatan.

##### 3) Air Bersih

Ketersediaan air bersih berperan sangat penting bagi daya tarik bisnis atau pelancong yang akan masuk ke suatu daerah. Tahun 2016 sebanyak 27.559 KK menggunakan layanan air PDAM. Kondisi kawasan kumuh tahun 2016 masih teridentifikasi 0,935%, dengan kondisi rumah tidak layak huni 33.278 unit. Kondisi ini menjadi tantangan bagi daya

saing Kabupaten Pati. Sedangkan untuk rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, tahun 2016 mencapai angka 71%.

Berdasarkan gambaran ketersediaan sarana dan prasarana wilayah, Kabupaten Pati perlu memprioritaskan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing.

### c. Iklim Investasi

Iklim investasi tidak dapat dipisahkan dari kondusivitas lingkungan yang memberi ketenangan berinvestasi. Kemudahan perizinan dan pemerintahan yang bersih menjadi daya tarik bagi calon investor. Demikian juga kondisi tenteram, tidak terganggu dengan kasus-kasus kriminal akan membantu daya tarik daerah dan berkontribusi pada daya saing daerah.

#### 1) Angka Kriminalitas

Salah satu permasalahan yang harus diminimalisir adalah angka kriminalitas. Kondusivitas lingkungan Kabupaten Pati tercermin dari data kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) sebesar 82,09%. Angka kriminalitas di tahun 2016 sebesar 1,69 dengan jumlah kasus 215 buah. Sementara itu, patroli satuan polisi pamong praja tercatat memiliki rasio patroli 2,42 kali dalam satu hari. Linmas berjumlah 9.431 orang serta poskamling memiliki rasio 7,93 perdesa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing daerah, efektifitas patroli lingkungan perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk jangka panjang, penanaman karakter yang sesuai dengan kearifan lokal juga perlu dilakukan.

#### 2) Perizinan

Permasalahan perijinan yang menjadi kendala peningkatan daya saing adalah kurang efektifnya proses perijinan serta ketidaksesuaian peruntukan antara lahan yang diinginkan investor dengan rencana penggunaan lahan. Selain itu, ketersediaan data terbaru berkaitan dengan potensi investasi di Kabupaten Pati belum optimal.

### d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja di Kabupaten Pati pada tahun 2015 paling banyak adalah lulusan SD ke bawah. Gambaran penduduk usia kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Pati periode 2012-2015 ditampilkan tabel berikut.

**Tabel II.66**  
**Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pati Tahun 2012-2015**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	SD ke bawah	300.606	303.173	314.108	328.702
2	SMP	106.611	118.671	117.380	117.032
3	SMA	112.467	127.644	129.856	122.610
4	D I/II/III dan Universitas	42.803	45.248	46.589	48.955
Jumlah		562.487	594.736	607.933	617.299

Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2013-2016.

## 2.5 Analisis Gambaran Umum Daerah

Amanat pembangunan daerah yang dimandatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 258 yaitu: (i) Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; (ii) kesempatan kerja; (iii) lapangan berusaha; (iv) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; (v) daya saing daerah.

Kondisi umum daerah kabupaten Pati dari aspek geografi dan demografi memberikan kekuatan dan juga memiliki kelemahan untuk memenuhi mandat pasal 258 tersebut di atas. Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), difungsikan sebagai kawasan lindung geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, diarahkan untuk pengembangan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan rakyat, serta lahan pertanian pangan berkelanjutan. Posisi ini berimplikasi Kabupaten Pati harus menjaga dinamika pembangunan daerahnya untuk mengamankan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan kata lain isu pembangunan hijau (*green development*) menjadi isu strategis yang perlu dikawal dalam program dan kegiatan pembangunan selanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Pati melayani wilayah seluas 1.503,68 Km memberikan tantangan isu pelayanan publik yang cepat dan inklusif. Posisi Pati yang berada di jalur Pantura yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa juga potensial disinggahi pelaku usaha atau penjelajah (*traveller*). Dengan demikian ketersediaan infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas antarwilayah dengan moda transportasi yang ramah lingkungan (*smart transportation*) menjadi isu strategis bidang infrastruktur. Hal ini sesuai dengan tantangan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada Goal 11: Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan, dengan target pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum.

Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Pati memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap dan budidaya memberikan keuntungan komparatif untuk membangun daya saing wilayah. Demikian halnya dengan potensi pengembangan wilayah untuk budidaya pertanian dan perkebunan memberikan tantangan isu penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk penguatan ekonomi berperspektif keberlanjutan lingkungan (*green economy*). Keberlanjutan lingkungan hidup sangat penting bagi kabupaten Pati karena basis utama kekuatan ekonominya bergantung pada alam.

Kondisi topografi dan klimatologi Kabupaten Pati mengkondisikan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pati untuk waspada bencana. Potensi bencana di Kabupaten Pati yaitu, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Karena isu strategis pengendalian lingkungan hidup secara sinergi menjadi tantangan yang harus dijawab melalui program dan kegiatan pembangunan daerah

Secara demografi, struktur penduduk Kabupaten Pati lapangan pekerjaan utama Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan disusul oleh Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel. Di era kemajuan teknologi informasi, atau era revolusi industri generasi ke empat memberi tantangan sekaligus ancaman bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk membangun ekonomi berbasis teknologi industri. Hal ini mengingat jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkat

Pendidikan di Kabupaten Pati didominasi oleh pendidikan SD ke bawah. Untuk itu isu kolaborasi antar lembaga dan pelaku usaha menjadi strategis dalam rangka meningkatkan investasi dan daya saing daerah, terutama bidang produksi hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata yang berbasis budaya lokal.

Aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah yang menjadi mandat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 memerlukan aksi pelayanan publik yang handal dari para ASN birokrasi yang profesional dan berintegritas. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menjadi barometer kualitas sumber daya manusia di birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya masih ada sasaran yang belum memenuhi target pembangunan RPJMD yaitu: penurunan kemiskinan; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Angka rata-rata lama sekolah; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Data ini memberikan tantangan kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk lebih tepat memilih program dan kegiatan pembangunan serta sinergitas antar OPD sehingga menghasilkan dampak yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Isu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel menjadi strategis untuk diwujudkan dalam periode RPJMD selanjutnya, terutama pada akuntabilitas penyediaan basis data pengukuran kinerja yang akurat dan terbaru. Ketersediaan basis data kinerja merupakan keniscayaan bagi akuntabilitas pemerintah.

Aspek penyelenggaraan pelayanan umum lebih diukur pada keluaran outcome program. Jika dikaitkan dengan belum tercapainya kinerja sasaran aspek kesejahteraan umum maka hal ini menunjukkan hal yang sangat krusial. Sasaran pembangunan yang belum tercapai terutama yang mewakili komponen kemampuan ekonomi, yaitu partisipasi angkatan kerja, pengangguran, kemiskinan. Data ini menandakan program dan kegiatan yang dipilih pada aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan belum tepat berorientasi pada sasaran utama pembangunan daerah. Oleh karena itu di RPJMD periode 2017-2022 perlu optimalisasi tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel.

Dari kesimpulan analisis ini, secara garis besar isu strategis pembangunan pemerintah Kabupaten Pati yang perlu diprioritaskan dalam RPJMD 2017-2022 adalah:

- 1) Isu sarana prasarana wilayah dan Kerjasama antar daerah;
- 2) Isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana;
- 3) Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- 4) Isu Penguatan ekonomi dan daya saing daerah;
- 5) Isu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel

Secara umum gambaran tentang Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.68**  
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<b>A</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	19,306	21,291	23,186	25,667	27,135	12,978	>
1.2	Nilai PDRB ADHK (= 000.000)	21.072,32	22.329,69	23.365,21	24.752,33	26.039,96	26.000,00	=
1.3	Laju pertumbuhan ekonomi	5,93	5,97	4,64	5,94	5,2	5 - 6	=
1.4	Inflasi Daerah	3,92	7,57	8,01	3,23	2,31	3 - 5	<
1.5	Indeks Gini	n.a	0,3	0,31	0,35	0,34	0,2	<
1.6	IPM	66,13	66,47	66,99	68,51	69,03	75	<
1.7	Tingkat kemiskinan	13,61	12,94	12,06	11,95	11,65	4,2	<
<b>B</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>							
1	Pendidikan							
1.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 25 tahun	6,15	6,27	6,35	6,71	6,83	7,5	<
1.2	Angka melek huruf	87,59	89,56	92,11	91	91,08	89,48	>
1.3	Harapan lama sekolah	10,9	10,93	11,24	11,79	11,92	12	<
2	Kesehatan							
2.1	Angka harapan hidup	75,34	75,4	75,43	75,63	75,69	71,95	>
2.2	Indek Keluarga Sehat	n.a	n.a	n.a	n.a	0,217	0,22	<
3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
3.1	Persentase peningkatan keluarga sejahtera					49	100	<
4	<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>							
4.1	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	89,31	89,43	89,99	91,06	n.a	66	>
4.2	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	63	65,99	65,95	65,74	n.a	54	>
4.3	Penurunan kesenjangan rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki	0,84	0,84	0,86	0,85	1,17	0	<
4.4	Penurunan kesenjangan Usia Harapan Hidup perempuan dan laki-laki	1,054	1,053	1,053	1,053	0,94	0	<
4.5	Penurunan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja	0,709	0,787	n.a	0,74	1,05	0	<
5	<i>Komunikasi dan Informatika</i>							
5.1	Persentase OPD yang sudah menerapkan E GOV/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	1,79	1,79	1,79	1,79	3,57	100	<
6	<i>Kearsipan</i>							
6.1	Persentase Pengelolaan Arsip Pola Baru	1,78	3,57	3,57	3,57	3,57	100	<
7	<i>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>							
7.1	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi							
	kependudukan	71,67	75,00	78,33	81,67	85,00	100	<
	catatan sipil	70	74	79	82,5	86	100	<
8	<i>Kebudayaan</i>							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
8.1	Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya					52,98	100	<
9	Tenaga Kerja							
9.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	12,2	7,3	6,37	4,43	4,12	6,6	>
9.2	Persentase penyerapan tenaga kerja	0,2	0,22	0,24	1,42	19,58	100	<
10	Pekerjaan Umum							
10.1	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan	63,24	59,72	61,3	67,58	72,78	100	<
10.2	Persentase rumah tangga terhadap akses air bersih	57,5	61,34	65,73	68,82	73,5	85	<
10.3	Kapasitas air baku daerah	70,62	52,39	64,91	64,21	79,49	100	<
11	Pangan							
11.1	Skor PPH	82,4	83,5	83,5	83	83	92,5	<
11.2	Penanganan Daerah Rawan Pangan					20	0	<
12	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
12.1	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban social Tertangani	77	75	73	70	68	66	<
12.2	Penurunan Indeks Risiko Bencana	98	174	n.a		174		
13	Lingkungan Hidup							
13.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47,82	56,65	53,66	59,01	59,13	66,5 - 68,5	<
14	Pertanian							
14.1	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha bidang pertanian	5,62	3,37	-2,57	8	3,71	5 - 6	<
15	Perdagangan							
15.1	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	1,9	4,05	5,85	4,51	5,04	5 - 6	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
16	Perindustrian							
16.1	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri	7,19	8,41	6,6	4,71	4,64	5 - 6	<
17	Penunjang Fungsi DPRD							
17.1	Persentase kinerja dewan yang dipublikasikan	n.a	n.a	n.a	n.a	85	100	<
18	Penunjang Fungsi Kebijakan dan Koordinasi							
18.1	Nilai LKJiP	35,11	38,9	41,29	48,21	50,13	60 -70	<
19	Penunjang Fungsi Penelitian dan Pengembangan							
19.1	Persentase kajian yg ditindak lanjuti untuk menjadi kebijakan daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	25	100	<
20	Penunjang Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
21.1	Indek Profesionalitas ASN							
	Struktural	n.a	n.a	n.a	n.a	77,4	86	<
	Fungsional	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	86	<
22	Penunjang Fungsi Pembinaan dan pengawasan							
22.1	Indek Reformasi birokrasi							
22.2	Tingkat maturitas SPIP	n.a	n.a	Level 1	Level 1	Level 2	Level 3	<
22.3	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	<
23	Penunjang Fungsi Perencanaan							
23.1	Persentase realisasi capaian RPJMD					66,7	100	<
24	Penunjang Fungsi Keuangan							
24.1	Opini WTP BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	=
24.2	Proporsi PAD terhadap APBD (PAD / APBD)					11,74		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
25	Penunjang Fungsi Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi							
25.1	Indek Kepuasan Masyarakat					3,1		
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>A</b>	<b>Pelayanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar</b>							
1	Kesehatan							
1.1	Angka kematian ibu		155,67	94,78	117,25	115	102	<
1.2	Angka kematian bayi	11,5	10,9	9,87	9,32	10,84		
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
2.1	Persentase kawasan kumuh	n.a	n.a	n.a	n.a	0,935	6,5	>
3	Pekerjaan Umum							
3.1	Daerah irigasi (DI) dalam kondisi baik	70	70	57	78	79	85	<
3.2	Persentase jalan kondisi baik	40	44	50	54,79	58	65	<
3.3	Persentase jembatan kondisi baik	72,33	72,5	73,3	73,3	74,68	100	<
4	Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat							
4.1	Penurunan Penyakit Masyarakat (%)	30	27	21	17	14	0	<
4.2	Persentase penanganan pelanggaran K3	85	86	87	88	89	100	<
5	Sosial							
5.1	Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial	n.a	n.a	n.a	n.a	5,65	0	<
<b>B</b>	<b>Pelayanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>							
1	Lingkungan Hidup							
1.1	Indek Kualitas Udara	94,95	95,95	80,12	100,92	101,67		
1.1	Indek Kualitas Air	33,16	44,12	50	47,04	46,67		
1.3	Indek tutupan lahan	23,46	36,56	36,56	36,56	36,56		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
<b>C</b>	<b>Pelayanan Urusan Pilihan</b>							
1	Pertanian							
1.1	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha bidang pertanian	5,62	3,37	-2,57	8	3,71	5 - 6	<
2	Perdagangan							
2.1	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	1,9	4,05	5,85	4,51	5,04	5 - 6	=
3	Perindustrian							
3.1	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri	7,19	8,41	6,6	4,71	4,64	5 - 6	<
<b>D</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>							
1	Penunjang Fungsi Keuangan							
1.1	Opini WTP BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	=
<b>III</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
A	Kemampuan Ekonomi							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
1.1	Persentase KUM yang aktif berproduksi	11	4	0,04	36	56	100	<
	Persentase Koperasi Sehat	n.a	9	0	1	0	100	<
2	Pertanian							
2.1	NTP	103,64	105,25	100,63	101,6	102,76		
2.2	Persentase produktivitas komoditas unggulan di sektor pertanian	9,89	-2,96	-4,41	9,88	-1,29		
3	Perdagangan							
3.1	Pertumbuhan industri kreatif daerah	0,7	0,7	0,72	0,68	0,65		
4	Perindustrian							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
4.1	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri					4		
5	Penanaman Modal							
5.1	Pertumbuhan investasi daerah (%)	n.a	26.555	71,30	965,88	0,82		
6	Kelautan dan Perikanan							
6.1	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan	14,33	-22,58	22,5	44,95	-29,51		
7	Pariwisata							
7.1	Pertumbuhan kunjungan wisata (%)		39,8	-11,99	21,66	12,45	1,7	>
<b>B</b>	<b>Fasilitas Wilayah</b>							
1	Perhubungan							
1.1	Rasio tingkat pelayanan ruas jalan	0,275	0,28	0,285	0,29	0,3	0,2	>
2	Penataan Ruang							
2.1	Persentase ketepatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan ruang	100	100	100	100	100	100	=
3	Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat							
3.1	Angka kriminalitas	1,85	1,81	1,77	1,73	1,69	0,60	<

